



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH ASPEK KEUANGAN DAN NON KEUANGAN  
TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA  
TAHUN 2007-2010**

**SKRIPSI**

**FAUZAH AVIVI**

**1006812005**

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA  
DEPOK**

**2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH ASPEK KEUANGAN DAN NON KEUANGAN  
TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA  
TAHUN 2007-2010**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana**

**FAUZAH AVIVI**

**1006812005**

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA  
DEPOK  
2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Fauzah Avivi

NPM : 1006812005

Tanda Tangan

Tanggal



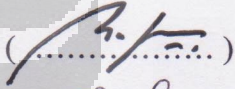
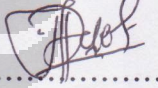



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Fauzah Avivi  
NPM : 1006812005  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi  
Bahasa Indonesia : Pengaruh Aspek Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2007-2010  
Bahasa Inggris : The Influence of Financial and Non Financial Aspects of the Implementation of the Indonesian Local Government Performance Years 2007-2010

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada **Program Studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia**.

### DEWAN PENGUJI

KETUA : Bramana Purwasetya S.Sos, M.Si (.....)   
PEMBIMBING : Debby Fitriyani SE., MSM (.....)   
ANGGOTA PENGUJI : M. Slamet Wibowo SE, MBA (.....) 

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 3 Juli 2012

Ketua Program Ekstensi Akuntansi,

Sri Nurhayati, SE., MM  
NIP: 19600317 198602 2001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'aalamin Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ektensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Debby Fitriyani, SE., MSM, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran di dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Bramana Purwasetya S.Sos, M.Si dan Bapak M. Slamet Wibowo SE, MBA sebagai penguji yang telah memberikan berbagai masukan kepada penulis, untuk menyempurnakan skripsi ini.
3. Kedua Orang Tua (Bpk H. Ir. Bahrul Edial dan Ibu Hj. Endang Susilawati) serta kakak dan adikku (Kak Fanny dan Farhan) terima kasih atas doa, semangat, kesabaran dan perhatian kalian yang tidak pernah habis untukku. Skripsi ini kupersembahkan untuk kalian. Serta keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
4. Ahmad Fikri Aulia, SE yang bersedia menjadi tempat bertukar pikiran. Terima kasih telah menemaniku di berbagai kesempatan, berbagi tawa dan duka.
5. Teman-teman *galau* di Ekstensi, Christine Sutanto, Dinar P. Listyani, Dina Widiana, Yusnita Hawilaruth, Angelina Nainggolan, Dinda Ayu Kartikasari, serta sahabatku, Herdy Pramita Putri. Anggota trio *Kwek-Kwek* yang tidak dapat dipisahkan Rr. Arintika dan Wendy Budianto. Teman-teman

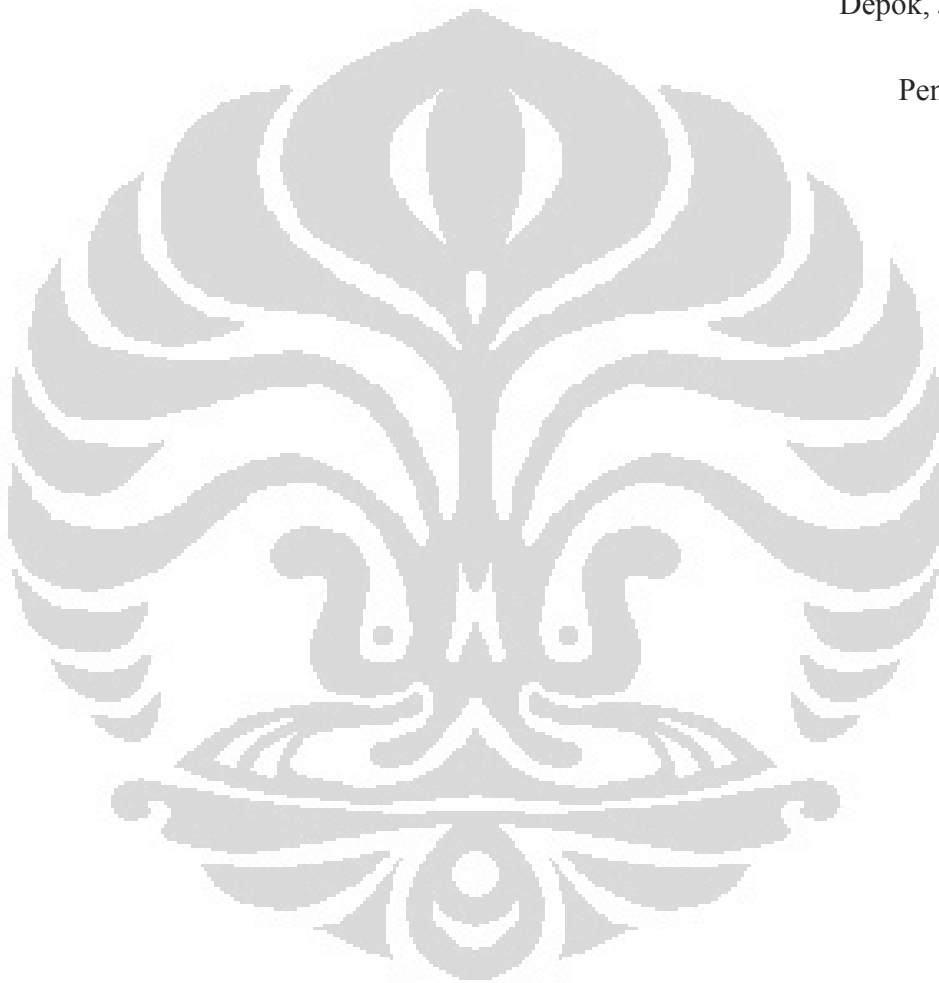
seperjuangan di FEUI yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih teman, kalian membuat kehidupanku di FEUI menjadi penuh warna.

*Love you guys!*

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Depok, Juli 2012

Penulis





**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauzah Avivi  
NPM : 1006812005  
Program Studi : Akuntansi  
Departemen : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive-royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pengaruh Aspek Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2010**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 3 Juli 2012

Yang menyatakan



( Fauzah Avivi )

## ABSTRAK

Nama : Fauzah Avivi  
NPM : 1006812005  
Program Studi : Ekstensi Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Aspek Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2010

Penelitian ini menguji pengaruh aspek keuangan (rasio aktivitas dan rasio efektivitas) dan aspek non keuangan (kinerja kesehatan dan kinerja perumahan) terhadap skor kinerja pemprov di Indonesia tahun 2007-2010. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2007-2010. Dengan menggunakan metode uji regresi berganda terhadap 93 sampel, hasilnya menunjukkan bahwa hanya kinerja kesehatan yang berpengaruh positif sedangkan variabel yang lain tidak memiliki pengaruh terhadap skor kinerja pemprov.

Kata kunci :  
Aspek keuangan, aspek non keuangan, kinerja pemerintah provinsi, EKPPD, LPPD



## ABSTRACT

Name : Fauzah Avivi  
NPM : 1006812005  
Study Program: Accounting  
Title :The Influence of Financial and Non Financial Aspects of the Implementation of the Indonesian Local Government Performance Years 2007-2010

This research test the influence of the financial aspects (activity ratio and effectiveness ratio) and non financial aspects (the performance of health, the performance of housing) from the score of the performance of province in Indonesia years 2007-2010. Performance score using the performance scores of Regional Government Performance Evaluation (EKPPD) the main source is the Report of Local Government Orgranization (LPPD) in 2007-2010. The result of multiple regression of 93 sample showed that only the performance of health have positive impact while other variables have no influence to performance scores.

Key words :  
Financial aspects, non financial aspects, provincial government's performance, EKPPD, LPPD

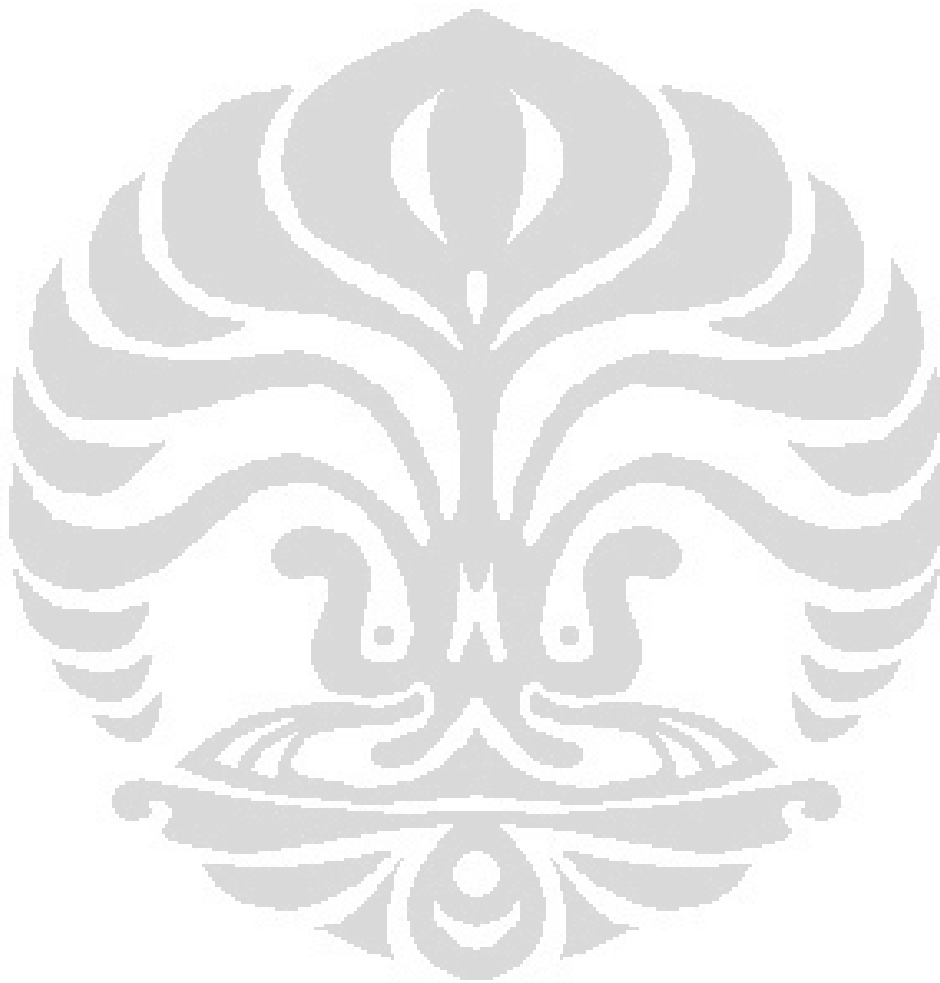
## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR PERSAMAAN MATEMATIKA</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN LITERATUR</b> .....	10
2.1 Kinerja Pemerintah Daerah .....	10
2.1.1 Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja .....	10
2.1.2 Peran Indikator Kinerja Dalam Pengukuran Kinerja .....	12
2.1.3 Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah	13
2.1.3.1 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	14
2.1.3.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	16
2.2 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah .....	18
2.2.1 Definisi dan Tujuan .....	18
2.2.2 Sumber Informasi .....	18
2.2.3 Sistem Pengukuran .....	19
2.3 Kinerja Keuangan Daerah.....	19
2.4 Penelitian Sebelumnya.....	21

<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	24
3.1 Kerangka Penelitian .....	24
3.2 Hipotesis Penelitian .....	25
3.2.1 Rasio Aktivitas .....	25
3.2.2 Rasio Efektivitas.....	26
3.2.3 Kinerja Kesehatan .....	27
3.2.4 Kinerja Perumahan.....	27
3.3 Model Penelitian .....	28
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	28
3.4.1 Variabel Dependen: Skor Kinerja Pemerintah Provinsi.....	28
3.4.2 Variabel Independen.....	29
3.4.3 Variabel Kontrol.....	30
3.5 Desain Pengambilan dan Ukuran Sampel Serta Data .....	32
3.5.1 Desain Pengambilan dan Ukuran Sampel .....	32
3.5.2 Data.....	32
3.6 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....	33
3.6.1 Uji Normalitas .....	33
3.6.2 Uji Asumsi Klasik .....	33
3.6.3 Uji Model Regresi .....	34
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN</b> .....	36
4.1 Statistik Deskriptif Sampel .....	36
4.1.1 Variabel Dependen .....	36
4.1.2 Variabel Independen.....	37
4.2 Uji Beda Rata-Rata .....	39
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	41
4.3.1 Uji Multikolinearitas .....	41
4.3.2 Uji Heteroskedastisitas .....	42
4.4 Uji Hipotesis.....	42
4.4.1 Uji Signifikansi Serentak ( <i>F-test</i> ) .....	43
4.4.2 Uji Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ).....	43
4.4.3 Uji Signifikansi Parsial ( <i>t-Test</i> ) .....	43
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	47

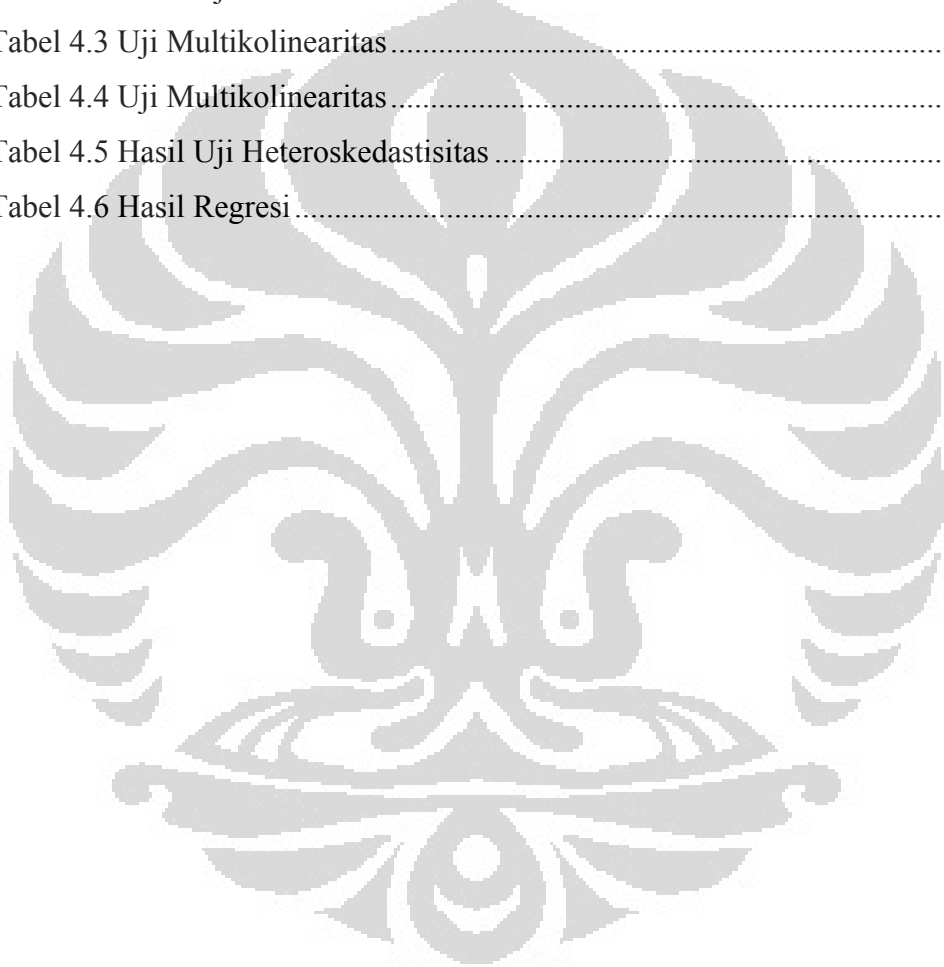


5.1 Kesimpulan .....	47
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	47
5.3 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya.....	48
<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	49
<b>LAMPIRAN</b> .....	53



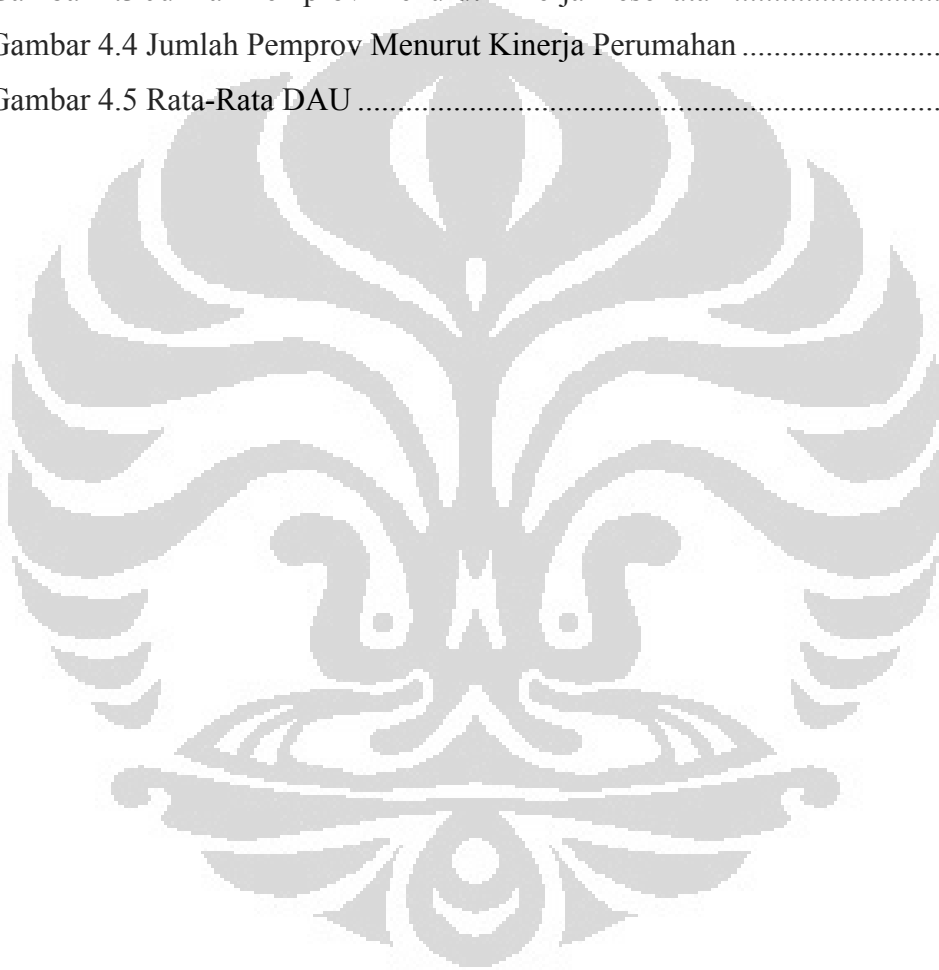
## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Prestasi Kinerja Pemerintah Provinsi Tahun 2007-2010 .....	3
Tabel 2.1 Rincian Urusan Wajib dan urusan Pilihan Desentralisasi.....	15
Tabel 3.1 Ringkasan Variabel Penelitian .....	31
Tabel 3.2 Proses Pengambilan Sampel .....	32
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	36
Tabel 4.2 Hasil Uji Beda Rata-Rata .....	40
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas .....	41
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas .....	41
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	42
Tabel 4.6 Hasil Regresi .....	42



## DAFTAR GAMBAR

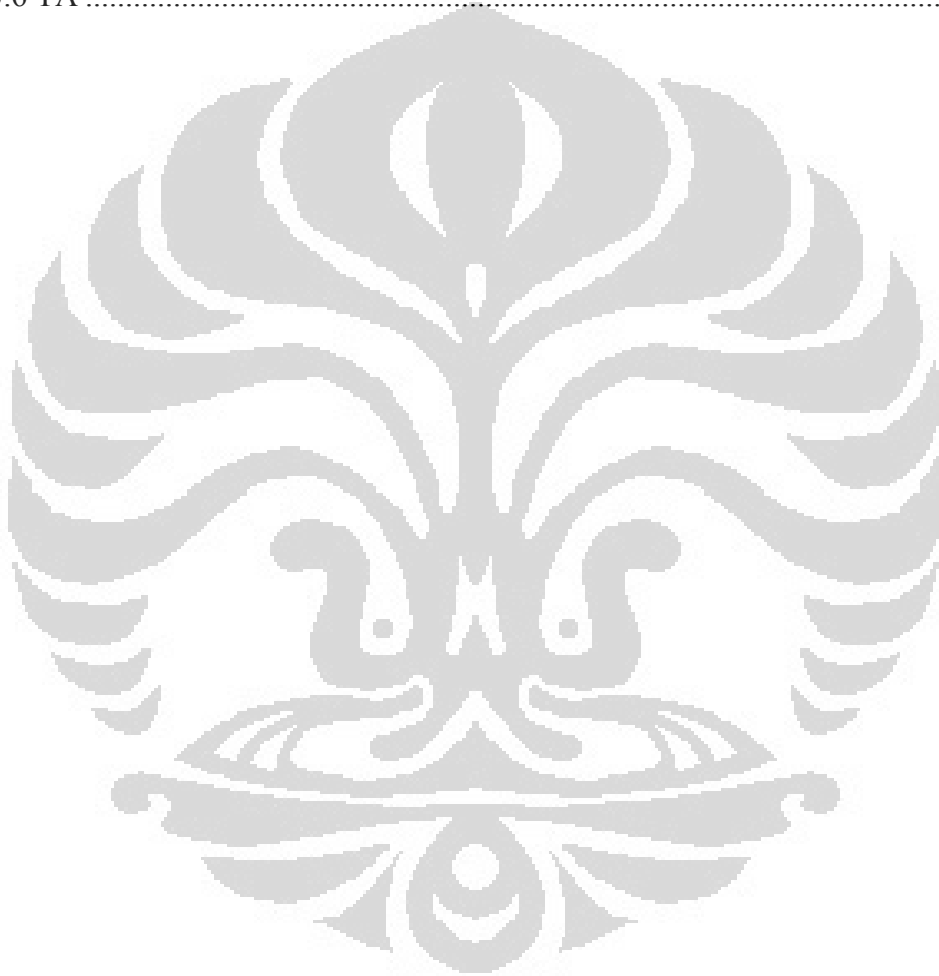
Gambar 1.1 Trend yang Terjadi Dalam Indikator-Indikator Kesehatan Utama di Indonesia Periode 1960-2005.....	5
Gambar 3.1 Kerangka Penelitian .....	25
Gambar 4.1 Rata-Rata Skor Kinerja Pemprov .....	36
Gambar 4.2 Jumlah Pemprov Menurut Rasio Efektivitas.....	37
Gambar 4.3 Jumlah Pemprov Menurut Kinerja Kesehatan .....	38
Gambar 4.4 Jumlah Pemprov Menurut Kinerja Perumahan .....	38
Gambar 4.5 Rata-Rata DAU .....	39





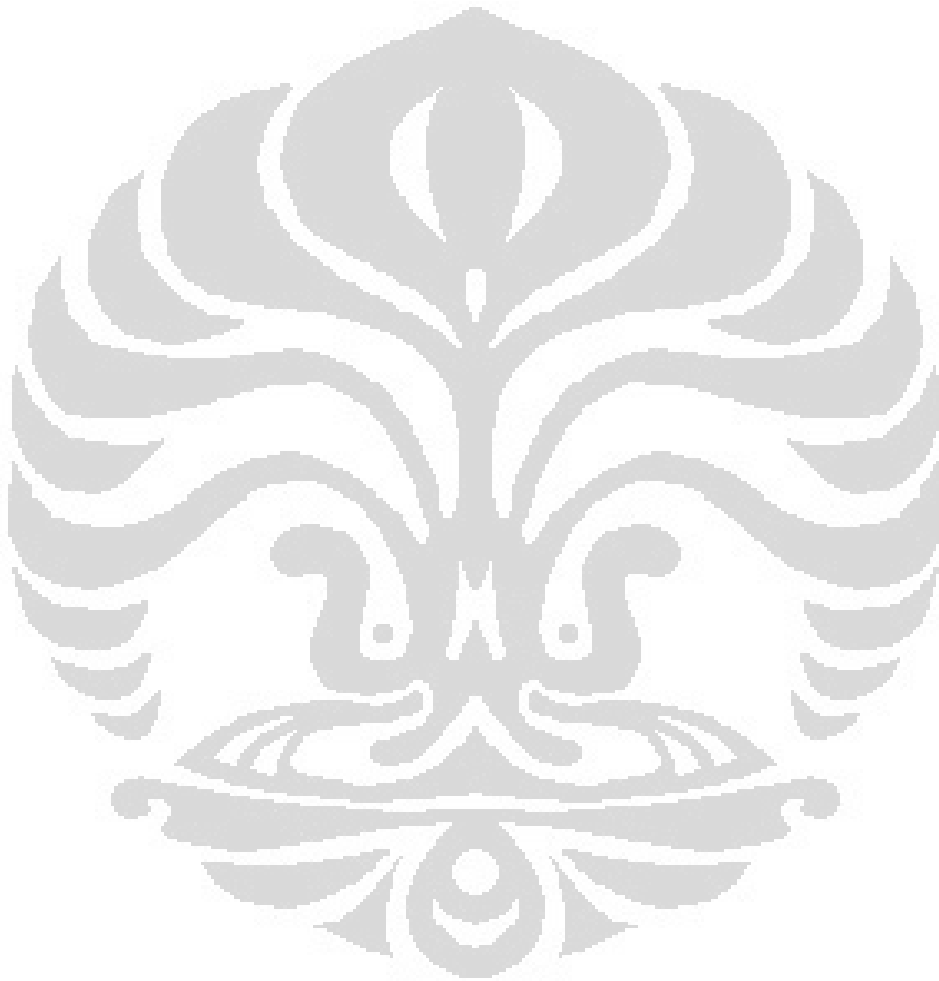
## DAFTAR PERSAMAAN MATEMATIKA

3.1 Rasio Belanja Pembangunan.....	29
3.2 Rasio Efektivitas .....	29
3.3 Sehat.....	30
3.4 Rumah .....	30
3.5 DAU .....	31
3.6 TA .....	31



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bagan Bobot dan Komponen EKPPD Berdasarkan LPPD dan/atau Seplemen LPPD Tahun Anggaran 2008 .....	53
Lampiran 2 Tabel Provinsi Tahun 2007-2010 .....	54



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1998 mendorong keinginan kuat dari pemerintah pusat untuk melepaskan sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah dan diharapkan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan keuangan sendiri. Menanggapi hal tersebut, sejak tahun 2001, Indonesia menerapkan desentralisasi (otonomi daerah) yang ditandai dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Dalam pasal 1 TAP MPR tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 (UU No. 22/1999) tentang Pemerintah Daerah menegaskan pelaksanaan desentralisasi dimana kota dan kabupaten bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah provinsi sebagai koordinator.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah, UU No. 22/1999 disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (UU No. 32/2004) tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU yang baru ini ditegaskan bahwa implikasi dari adanya otonomi daerah adalah pemerintah daerah (pemda) juga harus melakukan transparansi informasi sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, termasuk aktivitas non keuangan (Halim, 2007). Tuntutan untuk melaksanakan akuntabilitas publik mengharuskan pemda untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting* yaitu pelaporan kepada pemerintah pusat, akan tetapi juga melakukan *horizontal reporting* yaitu pelaporan kinerja pemerintah



daerah kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk *horizontal accountability* (Mardiasmo, 2004). Oleh karena itu, tiap kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32/2004. Lebih lanjut, kewajiban penyampaian informasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 (PP No. 3/2007) tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Sebagai tindak lanjut atas kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 (PP No. 6/2008) tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pasal 1 dari PP No. 6/2008 ini, evaluasi penyelenggaraan pemda terdiri dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB). Untuk menunjang pelaksanaan EKPPD, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 (Permendagri No.73/2009) tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 5 Permendagri No.73/2009 disebutkan bahwa sumber informasi utama dalam EKPPD ini adalah LPPD yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Aspek capaian kinerja ini terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Hasil EKPPD berupa Laporan Hasil Evaluasi Pemingkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

EKPPD pertama kali dilaksanakan untuk tahun anggaran 2007. Peringkat hasil EKPPD dilakukan pemerintah secara nasional dan dalam melakukan evaluasi LPPD menggunakan *template* analisis indeks yang hasil akhirnya berupa Indeks Hasil Evaluasi LPPD (selanjutnya disebut skor kinerja). Skor kinerja merupakan gabungan dari Indeks Capaian Kinerja (ICK) dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) setelah melalui proses pembobotan. Kriteria penilaian yang

ditetapkan terhadap skor kinerja dibagi ke dalam empat kriteria prestasi yaitu, Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), Sedang (S), dan Rendah (R). Tabel 1.1 menunjukkan jumlah pemerintah provinsi (pemprov) untuk masing-masing kriteria prestasi dari tahun 2007-2010.

**Tabel 1.1 Prestasi Kinerja Pemerintah Provinsi Tahun 2007-2010**

No.	Kriteria Prestasi	2007	2008	2009	2010
1	Sangat Tinggi	0	6	0	0
2	Tinggi	20	24	29	23
3	Sedang	10	3	4	10
4	Rendah	3	0	0	0

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Pemda Berdasarkan LPPD 2007-2010

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dalam periode 2007-2010 kinerja pemprov yang memiliki kriteria sangat tinggi hanya terdapat pada tahun 2008 yaitu berjumlah 6 (enam) provinsi. Sedangkan untuk kriteria rendah hanya terdapat pada tahun 2007 yaitu berjumlah 3 (tiga) provinsi.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administrasi dan desentralisasi ekonomi (Vitawati, 2008). Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelolanya secara efisien dan efektif, dengan demikian akan terjadi kemampuan/kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik.

Terkait dengan desentralisasi fiskal, elemen ini memberikan kewenangan kepada pemda untuk menggali pendapatan daerahnya sendiri melalui pemungutan pajak dan retribusi daerah. Desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan tujuan agar pemda mampu menggali sumber pembiayaan lokal dan membuat keputusan belanja secara mandiri sesuai dengan kebutuhan aktual dari daerahnya masing-masing. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan

menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Halim, 2002).

Usaha pemda dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dari sisi keuangan adalah dengan melakukan analisis atas rasio-rasio keuangan bersumber dari APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Terdapat beberapa jenis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD. Rasio-rasio tersebut adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan (Widodo, 2001 dalam Halim, 2002)

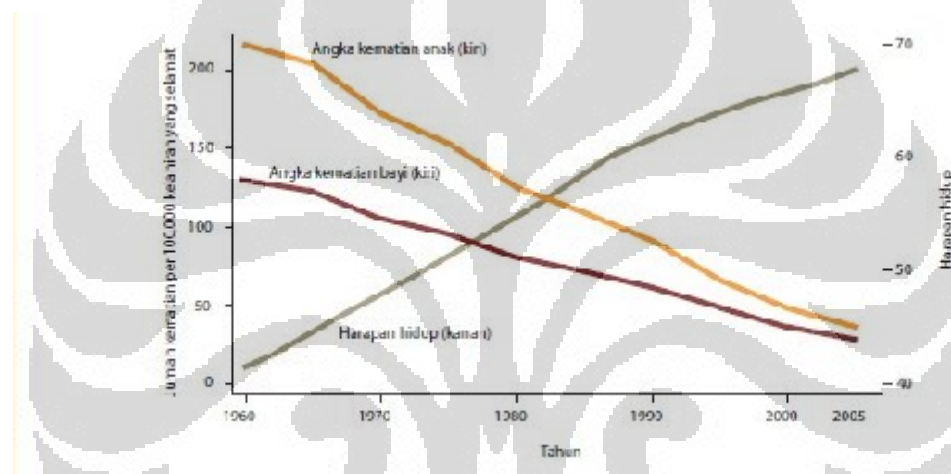
Pengelolaan keuangan yang baik oleh pemerintah daerah seharusnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang memadai dan masih banyak lagi, yang terangkum dalam 26 (dua puluh enam) urusan wajib pemda. Peningkatan kesejahteraan ini akan tercapai jika ada sarana dan prasarana publik yang disediakan oleh pemda. Pengeluaran belanja pemprov yang dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan publik seharusnya memiliki hubungan yang positif dengan pencapaian indikator-indikator sosial yang ada. Sebagai contoh indikator-indikator tersebut adalah kondisi dan kualitas pelayanan kesehatan dan kecukupan kebutuhan akan perumahan.

Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kondisi kesehatan yang buruk, khususnya pada ibu dan anak, akan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Hal ini dapat diatasi jika pemda dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai dan menjalankan program terkait bidang kesehatan yang ada dalam

dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga tingkat kesehatan masyarakat membaik.

Menurut data Bank Dunia tahun 2008, penduduk Indonesia saat ini berusia lebih panjang dan angka kematian anak menurun secara drastis. Hal ini dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 1960 yaitu 40 tahun meningkat menjadi 69 tahun di tahun 2005. Selama periode yang sama, Indonesia telah menurunkan angka kematian anak lebih dari sepertiga dan angka kematian bayi sebesar 25 persen.

**Gambar 1.1 Trend yang Terjadi Dalam Indikator-Indikator Kesehatan Utama di Indonesia Periode 1960-2005**



Sumber: *World Development Indicator (WDI) 2007*

Untuk dapat menurunkan angka kematian bayi pada saat kelahiran, dapat didukung dengan tenaga penolong kelahiran yang kompeten dalam bidangnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kelahiran balita menurut penolong kelahiran terdiri dari dokter, bidan, tenaga medis lainnya, dukun tradisional dan keluarga. Dalam *Kajian Pengeluaran Publik Indonesia untuk Sektor Kesehatan 2008* yang dilakukan oleh Bank Dunia menyatakan bahwa jumlah bidan di Indonesia cukup banyak karena adanya kebijakan *bidan-di-desa* yang menempatkan bidan di setiap desa. Namun kenyataannya, distribusi bidan tidak merata. Masalah distribusi ini sangat mendesak di wilayah pedesaan yang terpencil. Meskipun ada bidan di daerah terpencil tersebut, bidan cenderung kurang berpengalaman dan menangani lebih sedikit kelahiran, sehingga mereka

tidak dapat mempertahankan/mengembangkan kemampuan kebidanan profesional mereka.

*Kajian Pengeluaran Publik Indonesia untuk Sektor Kesehatan 2008* menjelaskan bahwa Indonesia masih menunjukkan kinerja yang buruk di sejumlah bidang penting, dan sebagai akibatnya, kemungkinan tidak dapat mencapai beberapa *Millenium Development Goal* (MDG) yang berkaitan dengan kesehatan. Secara khusus, Indonesia baru mencapai sedikit kemajuan dalam mengurangi angka kematian ibu hamil, memperbaiki gizi anak atau menanggulangi disparitas kesehatan secara geografis. Indikator kesehatan rata-rata lebih baik di Pulau Jawa dan Bali, sedangkan Indonesia bagian timur masih tertinggal. Sebagai contoh, di Bali dan Yogyakarta tidak sampai 25 dari 1000 anak meninggal sebelum ulang tahun kelima mereka, sedangkan di Gorontalo hampir 100 dari 1000 anak meninggal sebelum mencapai umur lima tahun. Kenyataan ini juga didukung dengan hasil EKPPD provinsi tahun 2007 yang menunjukkan bahwa urutan skor 3 (tiga) teratas untuk urusan kesehatan, semuanya berasal dari Indonesia bagian barat, khususnya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Masih terkait dengan faktor kesehatan, penyediaan air bersih yang layak juga merupakan salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Air merupakan bahan utama yang dipakai oleh masyarakat untuk kegiatan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bersama, lahan hijau yang digunakan sebagai daerah resapan air, sekarang banyak yang beralih fungsi menjadi gedung-gedung pencakar langit, limbah yang berasal dari rumah tangga dan industri juga telah mencemari tanah dikarenakan sistem pembuangan limbah yang tidak memadai. Hal-hal tersebut akan banyak kita temui di daerah perkotaan yang dominan dengan bangunan dibandingkan dengan lahan hijau. Sehingga bagi masyarakat di daerah perkotaan air bersih menjadi barang yang langka. Lain halnya dengan permasalahan di daerah terpencil. Daerah resapan air masih banyak kita temui di daerah terpencil karena tidak banyak gedung-gedung yang dibangun. Namun akses untuk mendapatkan air bersih tersebut belum tentu dimiliki oleh masyarakat di daerah terpencil. Tidak jarang mereka harus berjalan sangat jauh hanya untuk mendapatkan air bersih. Keadaan ekonomi mereka juga tidak mendukung untuk mendapatkan air bersih tersebut. Seharusnya penyediaan air

bersih pada prinsipnya diutamakan bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air bersih (Kodoatie, 2001 dalam Asih, 2006).

Peran pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, sangat diperlukan dalam mengatasi penyediaan air bersih ini. Sumber air bersih yang layak digunakan oleh masyarakat dimasukkan menjadi salah satu IKK untuk urusan perumahan dalam capaian kinerja urusan wajib penyelenggaraan urusan desentralisasi suatu pemda. Menurut Nugroho (2002), pendekatan kebijakan penyediaan air dapat dipisahkan menjadi dua, yakni sosial (*worst first*) dan ekonomi (*growth point*). Pendekatan sosial atau non ekonomi memfokuskan penyediaan air pada wilayah yang secara alami kekurangan air akibat pengaruh atau gangguan iklim. Penyediaan air ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan ternak serta didasari alasan kemanusiaan dan kesehatan masyarakat (*humanitarian schemes*). Di pedesaan, pendekatan sosial ini sangat baik dan prioritas penyediaannya dianggap lebih penting dibanding kualitas airnya. Sedangkan pendekatan ekonomi difokuskan kepada wilayah yang potensinya tinggi untuk dikembangkan secara ekonomi. Penyediaan air ditujukan untuk memancing aktifitas ekonomi ke arah pencapaian kualitas hidup yang tinggi dengan menerapkan fasilitas dan teknologi modern (*economic schemes*). Pendekatan ini menuntut investasi yang intensif untuk menghasilkan kualitas air yang memenuhi syarat kesehatan.

Penelitian terkait dengan kinerja pemprov belum banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian yang ada selama ini lebih banyak menggunakan data kabupaten/kota. Seperti misalnya dalam penelitian Hamzah (2008), Suranto (2009), Sumarjo (2010) dan Ardhini (2011) yang mengukur kinerja keuangan pemda kabupaten/kota menggunakan beberapa faktor diantaranya rasio keuangan dan faktor ekonomi makro. Febriana (2010), Dhuanovawati (2010), dan Dalimunthe (2010) melakukan analisis deskriptif atas kinerja kabupaten/kota. Sedangkan Mustikarini (2012) mengukur kinerja pemda dengan nilai EKPPD tahun 2007 yang dikaitkan dengan karakteristik pemda kabupaten/kota dan temuan audit.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan data provinsi karena ingin mengetahui sejauh mana kinerja provinsi sebagai koordinator dari pemda kabupaten/kota di Indonesia. Peneliti ingin mengetahui

lebih lanjut apakah rasio keuangan (yang merupakan indikator untuk mengukur kinerja keuangan) dan faktor sosial (sebagai indikator untuk mengukur kinerja non keuangan) memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah provinsi yang diukur dengan nilai EKPPD provinsi dari tahun 2007-2010.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah aspek keuangan, yang dilihat dari rasio aktivitas dan rasio efektivitas, berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2007-2010?
2. Apakah aspek non keuangan, yang dilihat dari kinerja kesehatan dan kinerja perumahan, berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2007-2010?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Membuktikan bahwa aspek keuangan, yang dilihat dari rasio aktivitas dan rasio efektivitas, memiliki pengaruh terhadap skor kinerja pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2007-2010.
2. Membuktikan bahwa aspek non keuangan, yang dilihat dari kinerja kesehatan dan kinerja perumahan, memiliki pengaruh terhadap skor kinerja pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2007-2010.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Pemerintah pusat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan dan non keuangan pemprov yang mempengaruhi kinerja pemprov. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mengambil kebijakan terkait kinerja pemerintah provinsi.
2. Pemerintah provinsi, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai variabel yang berpengaruh terhadap kinerja suatu pemprov sehingga dapat memperbaiki kinerja yang kurang memuaskan.



3. Akademisi dan penelitian selanjutnya, penelitian ini bisa menjadi literatur dan bahan untuk pengembangan penelitian berikutnya mengenai pengaruh kinerja keuangan dan kinerja non keuangan terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia berdasarkan EKPPD provinsi.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

- **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini.

- **Bab II Tinjauan Literatur**

Bab ini berisi landasan teori mengenai kinerja secara umum, indikator kinerja, akuntabilitas dan transparansi kinerja pemda, kinerja keuangan dan kinerja non keuangan pemda yang mendasari penelitian.

- **Bab III Metodologi Penelitian**

Bab ini meliputi penjelasan mengenai desain penelitian, metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel dan model penelitian yang digunakan.

- **Bab IV Analisis dan Pembahasan**

Bab ini akan menjelaskan hasil dari pengolahan data dan interpretasi dari hasil pengolahan data tersebut. Penulis akan menganalisis dan membahas hasil penelitian secara komprehensif.

- **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran baik kepada pemerintah provinsi maupun saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN LITERATUR

#### 2.1. Kinerja Pemerintah Daerah

##### 2.1.1. Pengertian Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Menurut Mahsun (2006), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2003), kinerja (*performance*) diartikan sebagai hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan dibandingkan standar yang telah ditentukan.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah (Silaen, 2006). Proses ini dimaksudkan untuk menilai setiap pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Menurut Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal dan eksternal organisasi yakni (Bastian, 2006):

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.

3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, informasi yang digunakan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu keuangan dan non keuangan. Hal ini karena kinerja sektor publik bersifat multidimensional sehingga pengukuran secara keuangan saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik, (Ulum, 2009). Lebih lanjut, Ulum (2009) menjelaskan sebagai berikut :

1. Informasi Keuangan

Salah satu cara pengukuran kinerja adalah menggunakan informasi keuangan. Pada penilaian laporan kinerja keuangan, pengukuran didasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan analisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada varians pendapatan dan varians pengeluaran.

2. Informasi Non Keuangan

Informasi non keuangan dapat dijadikan sebagai tolok ukur lainnya karena dapat menambah keyakinan terhadap kualitas pengendalian manajemen. Jenis informasi non keuangan dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci (*key variable*). Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor apa saja yang menjadi kunci kesuksesan suatu organisasi.

### 2.1.2. Peran Indikator Kinerja Dalam Pengukuran Kinerja

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan (Mardiasmo, 2006). Kegunaan indikator kinerja ini adalah sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2011), indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok:

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dari program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan non-fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama (*critical success factors*) dan indikator kinerja kunci (*key performance indicator*). Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini menggambarkan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci keuangan dan non-keuangan pada kondisi waktu tertentu (Halim, 2007). Faktor keberhasilan utama ini harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit organisasi. Dapat disimpulkan bahwa IKK digunakan sebagai capaian kinerja yang spesifik, definitif dan dapat diperbandingkan.

### **2.1.3. Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah**

Salah satu usaha untuk memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance* (Sadjiarto, 2000). Pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Pemerintah perlu melakukan reformasi yang berfokus pada budaya pencapaian kinerja untuk memenuhi dorongan perbaikan kinerja di sektor publik. Hal ini perlu dilakukan untuk mempertahankan dan memfokuskan pada apa yang sedang dicapai dan dihasilkan (*outcome and output*) serta memperbaiki transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Manajemen kinerja diperlukan untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas yang di dalamnya terdapat indikator kinerja, target kinerja, pelaporan kinerja dan mekanisme *reward and punishment* (Ormond & Loffler, 2002).

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Nordriawan & Hertianti, 2011). Sedangkan transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi (Halim, 2007). Dengan demikian, pembuatan laporan kinerja adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006).

### **2.1.3.1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU No. 32/2004) tentang Pemerintah Daerah, pemerintah membutuhkan standarisasi penilaian yang jelas untuk mengukur hasil penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa standarisasi yang jelas, pemerintah akan sulit mendapatkan gambaran dengan cepat, tepat dan komprehensif terkait dengan kinerja pemerintah daerah. Karena belum adanya format baku pelaporan sebagai sarana informasi yang dapat membantu mempercepat proses pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (PP No. 3/2007) tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah.

Menurut PP No. 3/2007 pasal 1, LPPD merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah. Lebih lanjut dalam pasal 9 disebutkan bahwa LPPD dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat. LPPD juga diposisikan untuk mampu menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan yang meliputi urusan wajib, urusan pilihan, serta tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP No. 3/2007 pasal 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Jenis urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 (PP No. 38/2007) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan secara bertahap, sedangkan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib dan pilihan menjadi dasar pembuatan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Rincian urusan wajib dan urusan pilihan desentralisasi dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Rincian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Desentralisasi**

<b>Urusan Wajib</b>			
<b>No.</b>	<b>Bidang</b>	<b>No.</b>	<b>Bidang</b>
1	Pendidikan	14	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2	Kesehatan	15	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
3	Lingkungan hidup	16	Perhubungan
4	Pekerjaan umum	17	Komunikasi dan informasi
5	Penataan ruang	18	Pertahanan
6	Perencanaan pembangunan	19	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
7	Perumahan	20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
8	Kepemudaan dan olahraga	21	Pemberdayaan masyarakat desa
9	Penanaman modal	22	Sosial
10	Koperasi dan UKM	23	Kebudayaan
11	Kependudukan dan catatan sipil	24	Satistik
12	Ketenagakerjaan	25	Kearsipan
13	Ketahanan pangan	26	Perpusatakaan
<b>Urusan Pilihan</b>			
<b>No.</b>	<b>Bidang</b>	<b>No.</b>	<b>Bidang</b>
1	Kelautan dan perikanan	5	Pariwisata
2	Pertanian	6	Industri
3	Kehutanan	7	Perdagangan
4	Energi dan sumber daya mineral	8	Ketransmigrasian

Sumber: PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Disamping penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan untuk urusan desentralisasi, ruang lingkup LPPD juga mencakup penyelenggaraan tugas pembantuan untuk provinsi meliputi:

1. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah;
2. Tugas pembantuan kepada kabupaten/kota; dan
3. Tugas pembantuan kepada desa

Untuk ruang lingkup LPPD yang terakhir adalah tugas umum pemerintahan meliputi:

1. Kerjasama antar daerah;
2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
3. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
4. Pembinaan batas wilayah;
5. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
6. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
8. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

### **2.1.3.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Halim, 2007). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD.

Melihat besarnya manfaat dari laporan keuangan maka pemerintah pusat menerbitkan aturan mengenai kewajiban Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang dituangkan melalui Undang-Undang No. 17 tahun

2003 (UU No. 17/2003) tentang Keuangan Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 (PP No. 71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan setidaknya meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Lebih lanjut, LRA setidaknya menyajikan unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Unsur yang dicakup dalam LAK terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya.

## **2.2. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah**

Regulasi yang digunakan dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 (PP No. 6/2008) tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 (Permendagri No. 73/2009) tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

### **2.2.1. Definisi dan Tujuan**

Berdasarkan PP No. 6/2008 pasal 1 dan Permendagri No. 73/2009 disebutkan bahwa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Tujuan dilakukan EKPPD disebutkan dalam PP No. 6/2008 pasal 1 adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

### **2.2.2. Sumber Informasi**

Menurut PP No. 6/2008 pasal 16 dan Permendagri No.73/2009 pasal 4, EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama. Selain LPPD dapat digunakan sumber informasi pelengkap antara lain:

1. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2. Informasi keuangan daerah.
3. Laporan kinerja instansi pemerintah daerah.
4. Laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
5. Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan daerah.
6. Laporan kepala daerah atas permintaan khusus.
7. Rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah.
8. Laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga independen.
9. Tanggapan masyarakat atas informasi LPPD.
10. Laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya.

### 2.2.3. Sistem Pengukuran

PP No. 6/2008 pasal 28 dan Permendagri No. 73/2009 pasal 15-18 menjelaskan bahwa sistem pengukuran kinerja dalam EKPPD mengintegrasikan pengukuran kinerja mandiri oleh pemerintahan daerah sendiri dengan pengukuran kinerja oleh pemerintah. EKPPD merupakan sistem pengukuran dengan menggunakan IKK dalam penilaian yang terintegrasi dengan penilaian mandiri oleh pemerintahan daerah dengan penilaian yang dilakukan oleh Tim Daerah dan Tim Nasional EPPD. Sistem pengukuran kinerja mencakup:

1. Indikator kinerja kunci (IKK).
2. Teknik pengumpulan data kinerja.
3. Metodologi pengukuran kinerja dan
4. Analisis, pembobotan dan interpretasi kinerja.

### 2.3. Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Azhar, 2008). Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Terdapat beberapa jenis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain (Widodo 2001 dalam Halim 2002):

#### 1) Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat/provinsi ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

## 2) Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja}}$$

## 3) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

#### 4) Rasio Pertumbuhan

Dalam rasio ini akan dilihat empat pertumbuhan komponen APBD yaitu: PAD, total pendapatan daerah, total belanja rutin, dan total belanja pembangunan. Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan demikian pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}_{X_n-(X_{n-1})}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}_{X_{n-1}}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}_{X_n-(X_{n-1})}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}_{X_{n-1}}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin} = \frac{\text{Realisasi Belanja Rutin}_{X_n-(X_{n-1})}}{\text{Realisasi Belanja Rutin}_{X_{n-1}}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Realisasi Belanja Pembangunan}_{X_n-(X_{n-1})}}{\text{Realisasi Belanja Pembangunan}_{X_{n-1}}}$$

#### 2.4. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang membahas tentang kinerja pemerintah daerah cukup banyak dilakukan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Lin *et al.* (2010) meneliti pengaruh pendapatan pemerintah daerah, Produk Domestik Bruto (PDB), impor, ekspor, dan *incomes of family* terhadap kinerja ekonomi di Cina. Dari seluruh variabel independen tersebut, berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. Sedangkan Coll *et al.* (2006) meneliti pengaruh pajak, transfer daerah, pendapatan daerah, *leverage*, dan belanja daerah terhadap kinerja pemda di Spanyol (rasio efisiensi). Hasil penelitian tersebut menunjukkan hanya transfer daerah dan *leverage* yang berpengaruh terhadap kinerja pemda di Spanyol untuk tahun 2006.

Di Indonesia, Sumarjo (2010) meneliti pengaruh karakteristik pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tahun 2008.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukuran daerah, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Lain halnya dengan Hamzah (2008) yang menggunakan rasio keuangan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara langsung dan mengukur tingkat pengangguran dan kemiskinan secara tidak langsung. Sasana (2009) mengukur kinerja ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah menggunakan desentralisasi fiskal yang di proksi dengan rasio derajat desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini adalah derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi.

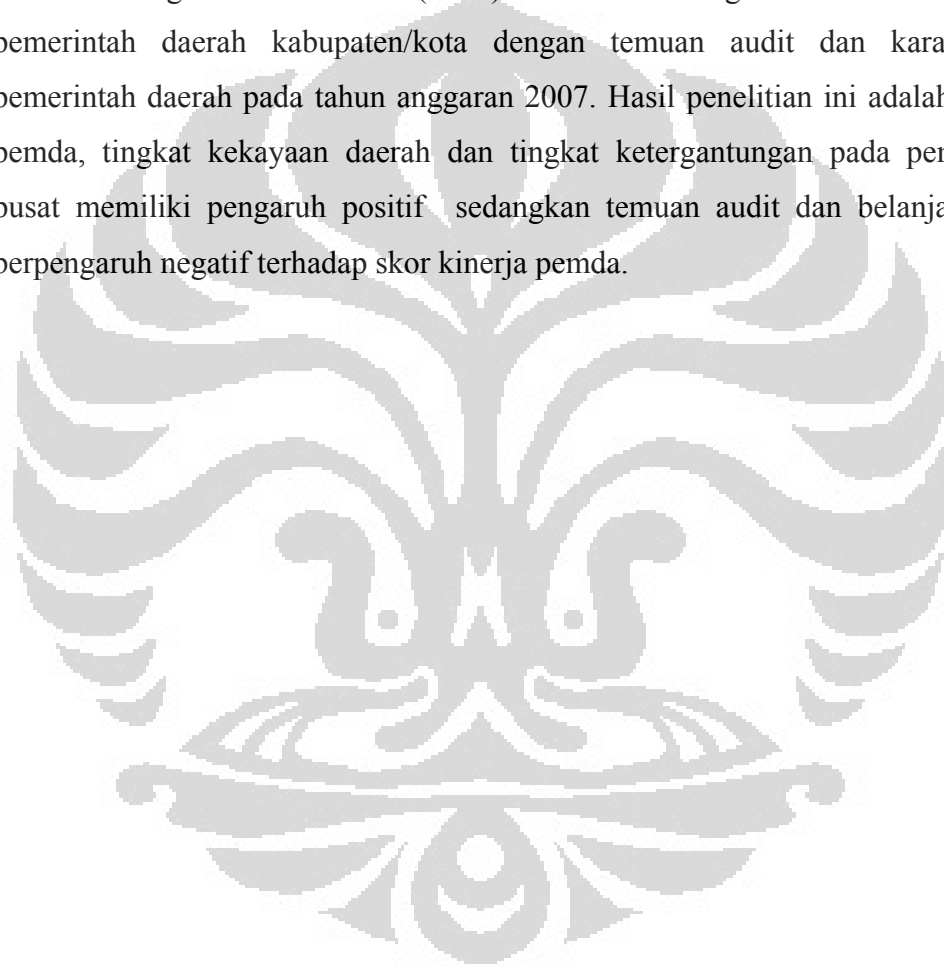
Selain kinerja keuangan, penelitian di Indonesia juga banyak yang menghubungkan kinerja non keuangan dengan kinerja ekonomi makro. Purba (2006) meneliti tentang pengaruh pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan dan tenaga kerja terhadap kinerja ekonomi makro di Kabupaten Simalungun pada tahun 1976-2003. Hasil penelitian menunjukkan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro. Rustiono (2008) menyimpulkan bahwa angkatan kerja, investasi swasta dan belanja pemda berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro di Provinsi Jawa Tengah.

Dari penelitian-penelitian di atas, proksi yang digunakan biasanya berupa kinerja keuangan atau ekonomi. Penelitian di Indonesia yang menggunakan skor EKPPD sebagai proksi kinerja atau menggunakan sumber data LPPD untuk menilai kinerja pemerintah daerah belum banyak dilakukan. Penelitian terkait laporan kinerja pemerintah provinsi belum dilakukan di Indonesia. Kebanyakan penelitian menggunakan sumber data pemerintah daerah kabupaten/kota dan bersifat deskriptif. Dalimunthe (2010) *mereview* evaluasi kinerja di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia dengan objek penelitian Pemkot Medan, Pemkab Wonogiri dan Pemkot Dumai. Dari kesembilan aspek yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa Pemkot Medan memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan pemda lainnya. Sedangkan Dhuanovawati (2010) menganalisis atas hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh tim evaluasi pada pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2008. Febriana (2010) menganalisis tingkat kinerja pemda dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan LPPD tahun 2008 dengan Pemkot



Medan, Balikpapan, Mataran dan Sorong sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja pemda dalam mencapai SPM adalah faktor sosial ekonomi penduduk dan karakteristik daerah. Banyaknya jumlah penduduk miskin menyebabkan indikator khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan belum memenuhi standar minimal pada keempat pemerintah kota. Di sisi lain, karakteristik daerah mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk memenuhi pelayanan dasar untuk masyarakat.

Sedangkan Mustikarini (2012) meneliti hubungan antara skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dengan temuan audit dan karakteristik pemerintah daerah pada tahun anggaran 2007. Hasil penelitian ini adalah ukuran pemda, tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki pengaruh positif sedangkan temuan audit dan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap skor kinerja pemda.



## BAB III METODELOGI PENELITIAN

### 3.1. Kerangka Penelitian

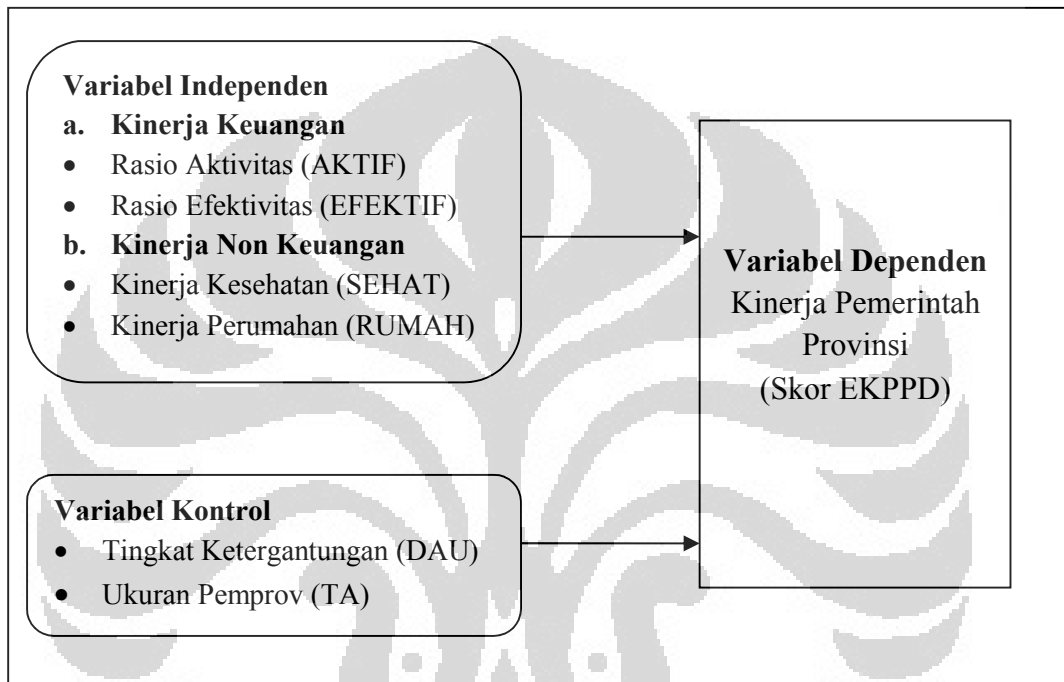
Sebagai dampak dari otonomi daerah, pemerintah daerah harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. Kewajiban pelaporan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 (PP No. 3/2007) tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Tidak hanya mengeluarkan laporan saja, namun kinerja pemerintah daerah (pemda) akan dievaluasi oleh pemerintah pusat. Kinerja pemerintah daerah dievaluasi berdasarkan LPPD dan suplemen LPPD menggunakan *template* analisis indeks yang hasil akhirnya berupa Indeks Hasil Evaluasi LPPD (selanjutnya disebut skor kinerja).

Sejak penyelenggaraan otonomi, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemda untuk mengelola daerahnya masing-masing. Pengelolaan daerah ini meliputi dua aspek, keuangan dan non keuangan. Dalam aspek keuangan, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola sumber keuangan yang ada dengan baik, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini penyediaan sarana dan prasarana. Jika pengelolaan keuangan ini telah dilakukan dengan optimal, diharapkan pengelolaan aspek non keuangan juga dapat memberikan hasil yang optimal.

Dalam penelitian ini peneliti ingin membuktikan hubungan antara aspek keuangan dan non keuangan dengan skor kinerja pemerintah provinsi (pemprov) di seluruh Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penelitian terkait kinerja keuangan dan kinerja non keuangan biasanya tidak digabungkan atau terpisah. Oleh karena itu, peneliti ingin mencoba menguji rasio aktivitas dan rasio efektivitas (aspek keuangan) serta kinerja kesehatan dan perumahan (aspek non keuangan) terhadap skor kinerja pemprov.

Aspek keuangan dalam penelitian ini hanya menggunakan rasio aktivitas dan rasio efektivitas karena mencari kesesuaian antara teori dalam Widodo (2001) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sedangkan untuk aspek non keuangan hanya menggunakan kinerja kesehatan dan kinerja perumahan karena mencari kesesuaian antara data yang tersedia dalam Badan Pusat Statistik (BPS) dan IKK.

**Gambar 3.2 Kerangka Penelitian**



Sumber: Olah data penulis

### 3.2. Hipotesis Penelitian

#### 3.2.1. Rasio Aktivitas

Secara umum, aktivitas pemda dapat dinilai dari alokasi (rasio) belanja yang muncul dalam anggaran, baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Heriansyah, 2005 dalam Susilo, 2007). Rasio ini menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Janur, 2009).

Belanja pembangunan adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Manfaat ini secara langsung dirasakan oleh masyarakat yaitu berupa tersedianya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja pemprov.

Menurut Susilo (2007) alokasi belanja daerah lebih banyak terkonsentrasi pada belanja rutin, sementara alokasi untuk kepentingan pembangunan, penyediaan fasilitas/infrastruktur yang bermanfaat bagi publik relatif rendah. Sehingga memberikan indikasi bahwa pemda belum mampu memfokuskan pengeluaran pada belanja pembangunan. Sedangkan penelitian Hakimudin (2010) menganalisis tingkat efisiensi sektor publik terutama belanja sektor kesehatan di Jawa Tengah Tahun 2005-2007. Hasil penelitian tersebut adalah terjadi pemborosan dalam penggunaan belanja kesehatan namun tidak diikuti dengan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Dapat disimpulkan, bahwa kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan belum optimal.

Dari uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

*Hipotesis 1: Rasio belanja pembangunan terhadap APBD memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja pemerintah provinsi.*

### **3.2.2. Rasio Efektivitas**

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemprov dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibandingkan dengan target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan kinerja pemprov semakin efektif karena dapat mencapai target PAD yang ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, efektivitas kinerja pemprov tersebut akan berpengaruh secara langsung pada kinerja pemprov secara keseluruhan karena PAD yang berhasil direalisasikan tersebut dapat digunakan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Cahya (2010) meneliti pengaruh rasio efektivitas PAD terhadap kinerja pemda. Dari penelitiannya diperoleh hasil

bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh signifikan dan memiliki korelasi yang kuat dan searah dengan kinerja pemda..

Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini adalah:

*Hipotesis 2: Rasio efektivitas memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja pemerintah provinsi.*

### **3.2.3. Kinerja Kesehatan**

Pemprov memiliki peran yang penting dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelayanan kesehatan yang memadai. Ketika pelayanan kesehatan yang terbaik telah diberikan oleh pemprov maka diharapkan tingkat kesehatan masyarakat daerah tersebut juga akan meningkat dan pada akhirnya hal ini dapat meningkatkan kinerja pemprov secara umum.

Berdasarkan data dari BPS Angka Harapan Hidup (AHH) di Indonesia meningkat dari tahun 2007-2010. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah dapat memberikan pelayanan yang memadai, salah satunya dengan memberikan fasilitas berupa pertolongan persalinan sehingga ibu yang akan melahirkan dapat ditangani dengan baik. Meningkatnya AHH secara tidak langsung meningkatkan kinerja pemprov. Oleh karena itu, kinerja kesehatan dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat apakah kinerja pemprov telah memadai atau belum.

Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

*Hipotesis 3: Kinerja kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja pemerintah provinsi.*

### **3.2.4. Kinerja Perumahan**

Perumahan yang sehat tidak lepas dari ketersediaan sarana dan prasarana terkait, seperti penyediaan air bersih, sanitasi pembuangan sampah, transportasi, dan tersedianya pelayanan sosial (Krieger and Higgins, 2002 dalam Keman, 2007). Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf hidup masyarakat. Meningkatnya taraf hidup masyarakat secara tidak langsung meningkatkan kinerja pemprov dalam hal penyediaan air bersih. Oleh karena itu,

pemerintah diharapkan dapat menyediakan pelayanan dan infrastruktur yang memadai dalam rangka meningkatkan kinerjanya untuk sektor perumahan.

Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

*Hipotesis 4: Kinerja perumahan memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja pemerintah provinsi.*

### 3.3. Model Penelitian

Dalam model penelitian ini skor kinerja pemerintah provinsi yang berasal dari Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan LPPD Tahun 2007-2010 Tingkat Nasional menjadi variabel dependen (SKOR). Sedangkan variabel independen dalam model penelitian ini terdiri dari:

1. Rasio Aktivitas yang dilihat dari rasio belanja pembangunan terhadap total belanja (AKTIF).
2. Rasio Efektivitas yang dilihat dari rasio realisasi penerimaan PAD terhadap anggaran PAD berdasarkan potensi riil daerah (EFEKTIF).
3. Kinerja kesehatan yang dilihat dari persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (SEHAT).
4. Kinerja perumahan yang dilihat dari persentase rumah tangga pengguna air bersih (RUMAH).

Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol sebagai berikut:

1. Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang dilihat dari DAU terhadap total pendapatan (DAU).
2. Ukuran pemprov yang dilihat dari total aset (TA).

Model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$SKOR_{it} = \beta_0 + \beta_1 AKTIF_{it} + \beta_2 EFEKTIF_{it} + \beta_3 SEHAT_{it} + \beta_4 RUMAH_{it} + \beta_5 DAU_{it} + \beta_6 TA_{it} + \varepsilon$$

### 3.4. Definisi Operasional Variabel

#### 3.4.1. Variabel Dependen: Skor Kinerja Pemerintah Provinsi

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah skor kinerja pemerintah provinsi yang berasal dari Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan LPPD Tahun 2007-2010 Tingkat Nasional dengan *range* nilai 0-4. Evaluasi dilakukan berdasarkan penilaian portfolio secara *desk evaluation* terhadap data yang dimuat dalam LPPD tahun 2007-2010 dan penilaian lapangan terhadap prestasi kinerja yang dicapai oleh masing-masing pemerintah provinsi.

### 3.4.2. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Dalam penelitian ini rasio yang dipakai adalah rasio belanja pembangunan terhadap total belanja. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil. Data yang digunakan untuk menghitung rasio ini berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja}} \quad (3.1)$$

#### 2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemprov dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Data yang digunakan untuk menghitung rasio ini berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \quad (3.2)$$

### 3. Kinerja Kesehatan

Dalam penelitian ini kinerja kesehatan diproksikan dengan menggunakan persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Persentase ini dipilih karena merupakan data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan merupakan salah satu IKK dalam LPPD yang digunakan sebagai sumber penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

$$SEHAT = \text{persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan} \quad (3.3)$$

### 4. Kinerja Perumahan

Dalam penelitian ini kinerja perumahan diproksikan menggunakan persentase rumah tangga pengguna air bersih. Persentase ini dipilih karena merupakan data yang dipublikasi oleh BPS dan merupakan salah satu IKK dalam LPPD yang digunakan sebagai sumber penyusunan EKPPD.

$$RUMAH = \text{persentase rumah tangga pengguna air bersih} \quad (3.4)$$

#### 3.4.3. Variabel Kontrol

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Tingkat Ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat

Tingkat ketergantungan diukur dengan seberapa besar porsi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima pemprov dibandingkan dengan total pendapatan pemprov. DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumarjo (2010), Puspita (2010) dan Mustikarini (2012) membuktikan bahwa tingkat ketergantungan yang diukur melalui DAU berpengaruh positif terhadap kinerja pemda.



$$DAU = DAU / total\ pendapatan \quad (3.5)$$

## 2. Ukuran Pemprov

Dalam penelitian ini dipertimbangkan ukuran provinsi sebagai salah satu variable kontrol atas kinerja pemprov. Pemerintah provinsi yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan yang lebih besar untuk memperbaiki kinerjanya. Sumarjo (2010) dan Mustikarini (2012) membuktikan bahwa ukuran pemda berpengaruh positif terhadap kinerja pemda. Dengan demikian, pemprov yang memiliki ukuran besar diharapkan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemprov yang kecil ukurannya.

$$TA = \ln\ total\ aset\ pemrov \quad (3.6)$$

**Tabel 3.1 Ringkasan Variabel Penelitian**

Variabel	Keterangan	Ukuran Variabel	Hipotesis
<b>SKOR</b>	Skor kinerja Pemprov hasil EKPPD 2007-2010	Skor kinerja Pemprov	
<b>AKTIF</b>	Rasio Aktivitas	$\frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja}}$	(+)
<b>EFEKTIF</b>	Rasio Efektivitas	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}}$	(+)
<b>SEHAT</b>	Kinerja Kesehatan	Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	(+)
<b>RUMAH</b>	Kinerja Perumahan	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	(+)
<b>DAU</b>	Tingkat Ketergantungan	$\frac{DAU}{\text{Total Pendapatan}}$	(+)
<b>TA</b>	Ukuran Pemprov	Ln Total Aset	(+)

Sumber: Olah data penulis

### 3.5. Desain Pengambilan dan Ukuran Sampel Serta Data

#### 3.5.1. Desain Pengambilan dan Ukuran Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah semua pemprov yang memiliki data yang dibutuhkan untuk penelitian ini selama tahun 2007-2010. Untuk laporan keuangan pemprov yang digunakan adalah laporan keuangan pemprov yang memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan pengecualian (WDP) karena peneliti ingin mendapatkan hasil yang paling akurat, maka laporan keuangan harus yang *reliable*. Daftar seluruh pemprov yang menjadi sampel penelitian dapat dilihat di lampiran.

**Tabel 3.2 Proses Pengambilan Sampel**

Proses Pengambilan Sampel	Jumlah Pemprov
Jumlah seluruh Pemprov 2007-2010 (4 tahun x 33 provinsi)	132
Pemprov dengan data tidak lengkap	(9)
Jumlah Pemprov dengan data lengkap	123
Pemprov yang memiliki opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	(30)
Data <i>outlier</i>	-
Jumlah sampel akhir dalam penelitian	93

Sumber: Olah data penulis

#### 3.5.2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa:

1. Skor kinerja pemprov yang bersumber dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2007 – 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Total belanja langsung, total belanja, realisasi dan anggaran PAD yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemprov tahun 2007 – 2010.
3. Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan persentase rumah tangga pengguna air bersih bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2007-2010.

### 3.6. Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

#### 3.6.1. Uji Normalitas

Uji normalitas data menjadi prasyarat pokok dalam analisis parametrik seperti korelasi, uji perbandingan rata-rata, analisis varian dan sebagainya, karena data-data yang akan dianalisis parametrik harus terdistribusi normal. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak (Priyatno, 2011)

#### 3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup *homoscedastic*, *no-multicollinearity* dan *no-autocorrelation* (Ajija *et al*, 2011). Dalam penelitian ini dilakukan tiga uji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis meliputi pengujian multikolinearitas, pengujian autokorelasi, dan pengujian heteroskedastisitas.

##### 1. Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi dimana terdapat hubungan atau adanya korelasi antara satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Multikolinearitas dapat dideteksi secara mudah dengan melihat hasil output regresi. Ciri-ciri terdapat multikolinearitas adalah apabila banyak nilai t-statistik tidak signifikan tetapi nilai  $R^2$  sangat besar. Namun untuk lebih memastikan dapat dilakukan tes korelasi antar variabel independen, apabila nilai koefisien  $> 0,80$  maka terdapat masalah multikolinearitas.

Selain itu, untuk mengetahui adanya multikorelasi dapat juga dilakukan dengan menguji nilai VIF dan *Tolerance*. Berdasarkan teori, jika nilai VIF mendekati 1 berarti tidak terdapat multikolinieritas. Multikolinieritas dianggap terjadi jika nilai VIF  $> 5$ . Begitu pula untuk nilai *Tolerance*, jika nilainya adalah 1 berarti antar variabel independen tidak berkorelasi. sedangkan untuk nilai *Tolerance* adalah 0 berarti terjadi korelasi sempurna.

##### 2. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah kondisi varian dari residual atau *error* tidak konstan atau tidak sama untuk setiap observasi. Pemecahan masalah heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan *Weighted Least Square*, yaitu

membobotkan setiap variabel dengan varians yang tidak konstan dengan tujuan untuk membuat varians menjadi konstan. Heteroskedastisitas tidak akan membuat parameter-parameter pada OLS menjadi bias, hanya saja koefisiennya menjadi tidak efisien. Program E-views menyediakan metode koreksi untuk koefisien dalam model yaitu metode koreksi koefisien *white cross-section* sehingga koreksi dapat secara otomatis.

### 3. Autokolerasi

Autokolerasi adalah kondisi dimana terdapat hubungan antara *error term* pada satu observasi dengan observasi lainnya. Autokorelasi juga dapat dideteksi secara mudah dengan melihat hasil output regresi. Apabila nilai Durbin-Watson stat (DW-stat)  $\approx 2$ , maka tidak ada masalah autokorelasi. Namun untuk lebih memastikan, nilai DW-stat kemudian dibandingkan dengan nilai d-tabel. Hasil perbandingan akan menghasilkan kesimpulan seperti kriteria sebagai berikut:

1. Jika  $d < d_l$ , berarti terdapat autokorelasi positif
2. Jika  $d > (4 - d_l)$ , berarti terdapat autokorelasi negatif
3. Jika  $d_u < d < (4 - d_u)$ , berarti tidak terdapat autokorelasi
4. Jika  $d_l < d < d_u$  atau  $(4 - d_u)$ , berarti tidak dapat disimpulkan

#### 3.6.3. Uji Model Regresi

##### 1. Uji F-Statistik

Uji F-stat dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel-variabel independen secara bersamaan akan memiliki pengaruh yang signifikan kepada variabel dependen. Signifikansi dari uji F dapat dilihat dari F-statistik. Jika F-statistik lebih besar F-tabel, maka persamaan regresi tersebut signifikan. Suatu model dianggap signifikan jika nilai probabilitas *Prob.(F-Statistic)* lebih kecil 5% karena itu nilainya semakin baik jika semakin rendah.

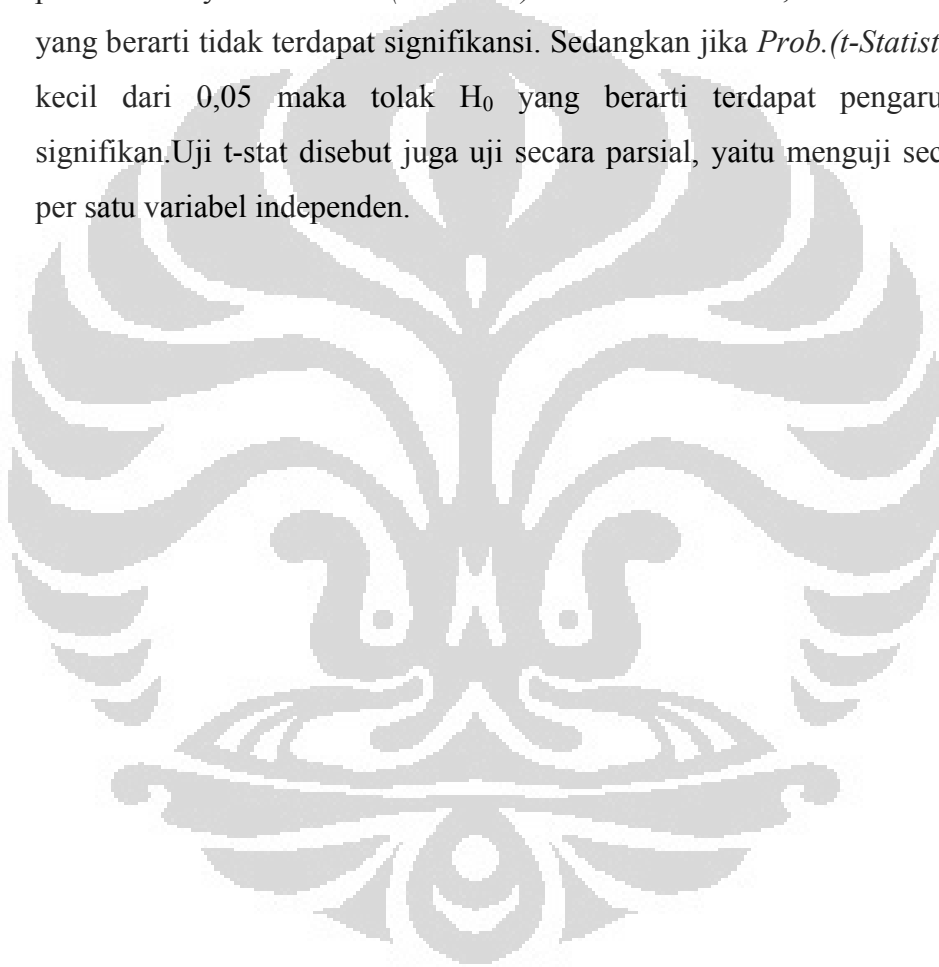
##### 2. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi nilai variabel terikat (dependen) dapat dijelaskan oleh variasi nilai dari variabel-variabel bebasnya (independen). Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 menandakan model

penelitian semakin baik yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya (Ajija *et al*, 2011).

### 3. Uji t-Statistik

Uji t-stat dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Untuk mengetahui apakah koefisien variabel independen memiliki hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependennya, dapat dilihat dari probabilitasnya. Jika *Prob.(t-Statistic)* lebih besar dari 0,05 maka terima  $H_0$  yang berarti tidak terdapat signifikansi. Sedangkan jika *Prob.(t-Statistic)* lebih kecil dari 0,05 maka tolak  $H_0$  yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Uji t-stat disebut juga uji secara parsial, yaitu menguji secara satu per satu variabel independen.



**BAB IV**  
**ANALISIS HASIL PENELITIAN**

**4.1. Statistik Deskriptif Sampel**

Tabel 4.1 merupakan statistik deskriptif variabel dependen, independen dan kontrol dari 93 sampel dalam penelitian ini.

**Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

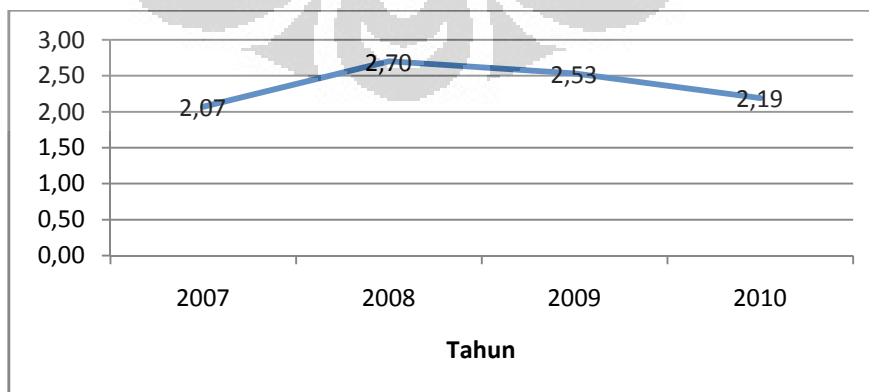
N=93	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev.
<b>SKOR</b>	2.37	3.44	0.40	0.51
<b>AKTIF</b>	28.48	101.86	9.03	13.40
<b>EFEKTIF</b>	109.17	166.37	56.20	14.81
<b>SEHAT</b>	56.59	76.51	18.21	11.48
<b>RUMAH</b>	46.96	69.21	22.32	10.31
<b>DAU</b>	33.67	132.92	0.00	22.70
<b>TA (Rp. triliun)</b>	20.01	407.09	0.70	69.30

Sumber: Olah data Eviews

**4.1.1. Variabel Dependen**

Dalam Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata skor kinerja sebesar 2.37, yang berarti bahwa rata-rata skor kinerja pemprov baik karena berada pada kriteria prestasi tinggi. Pemprov yang memiliki skor kinerja tertinggi selama tahun 2007-2010 adalah Provinsi Jawa Tengah dengan skor 3.43 untuk tahun 2008.

**Gambar 4.1 Rata-Rata Skor Kinerja Pemprov**



Sumber: Olah data penulis

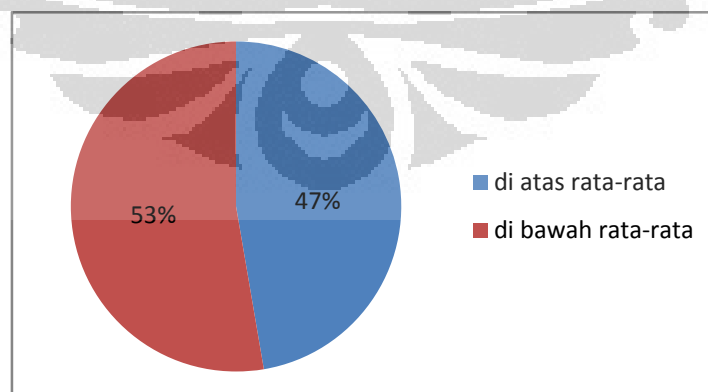
Berdasarkan Gambar 4.1, tren rata-rata skor kinerja pemprov dari tahun 2007-2010 masih berada pada kriteria prestasi tinggi. Terjadi kenaikan yang signifikan pada tahun 2008 lalu cenderung turun sampai tahun 2010.

#### 4.1.2. Variabel Independen

Dari sisi kinerja keuangan, dapat dilihat rasio belanja pembangunan terhadap total belanja provinsi masih sangat kecil. Dapat dilihat dari Tabel 4.1 nilai rata-rata rasio aktivitas hanya sebesar 28.48%. Hal ini menandakan bahwa pemprov dalam mengalokasikan belanja pembangunan masih sangat kecil dibandingkan dengan belanja rutin. Bahkan terdapat pemprov yang mengalokasikan belanja pembangunan hanya kurang dari 10% total belanjanya.

Nilai rata-rata untuk rasio efektivitas sebesar 109.17% yang dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran PAD. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik dalam merealisasikan PAD. Pemprov yang paling rendah memiliki rasio ini adalah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2010 dan yang paling tinggi adalah Provinsi Bangka Belitung di tahun anggaran yang sama. Berdasarkan Gambar 4.2, persentase pemprov yang memiliki rasio efektivitas di atas rata-rata adalah sebesar 47% (44 pemprov). Hal ini berarti masih banyak pemprov yang terlalu tinggi dalam menargetkan PAD dan tidak diimbangi oleh kemampuan untuk merealisasikan hal tersebut.

**Gambar 4.2 Jumlah Pemprov Menurut Rasio Efektivitas**

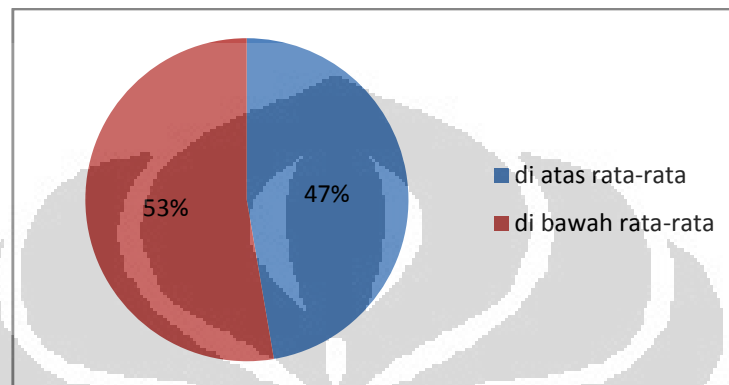


Sumber: Olah data penulis

Dari sisi non keuangan, nilai rata-rata SEHAT sebesar 56% menunjukkan bahwa kinerja kesehatan pemprov sudah baik. Namun, berdasarkan Gambar 4.3,

kinerja kesehatan 49 pemprov (53%) masih berada di bawah rata-rata dan sebagian besar pemprov tersebut berada di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Dapat disimpulkan bahwa pertolongan pertama persalinan yang dilakukan oleh bidan belum merata di seluruh provinsi di Indonesia.

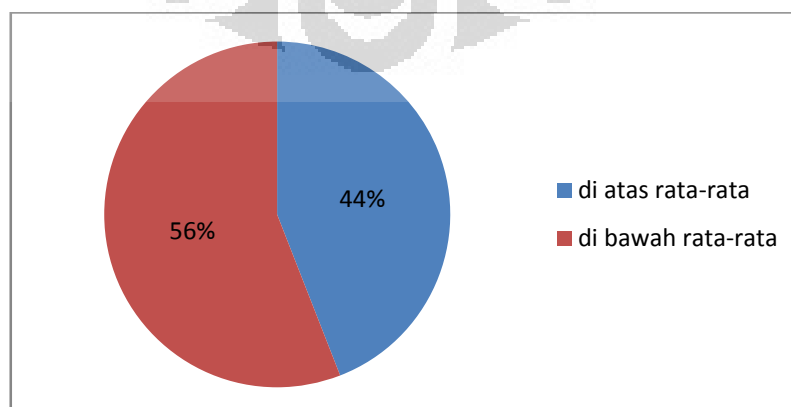
**Gambar 4.3 Jumlah Pemprov Menurut Kinerja Kesehatan**



Sumber: Olah data penulis

Sedangkan nilai rata-rata dari sisi non keuangan lainnya yaitu RUMAH sebesar 47% dengan nilai kinerja perumahan paling rendah terdapat pada Provinsi Banten tahun 2010 yaitu sebesar 22.32% dan paling tinggi terdapat pada Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007 sebesar 69.21%. Berdasarkan Gambar 4.4, masih banyak pemprov yang memiliki nilai di bawah rata-rata yaitu sebanyak 52 pemprov (56%) yang sebagian besar berada di Indonesia bagian timur. Hal ini menandakan bahwa jumlah rumah tangga pengguna air bersih masih relatif sedikit terutama di Indonesia bagian timur.

**Gambar 4.4 Jumlah Pemprov Menurut Kinerja Perumahan**

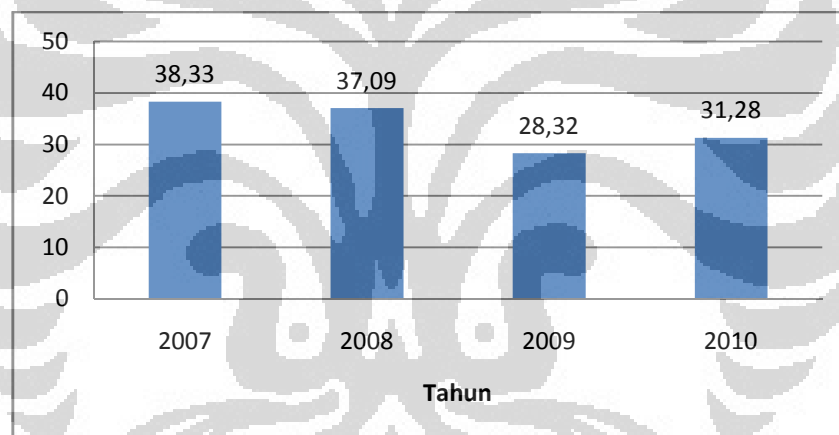


Sumber: Olah data penulis



Variabel kontrol DAU sebesar 33.67% menandakan bahwa porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dalam total pendapatan pemprov relatif rendah. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan pemprov di Indonesia terhadap dana pemerintah pusat sudah menurun karena nilai rasionya berada di bawah 50%. Namun, terdapat perbedaan nilai yang signifikan pada nilai DAU yang terendah dan terbesar. Hal ini dikarenakan ada provinsi yang tidak mendapatkan DAU yaitu DKI Jakarta untuk tahun 2007-2010. Dalam Gambar 4.5 terlihat rata-rata DAU untuk tahun 2007-2010. Terlihat bahwa tren DAU menurun dari tahun 2007-2009 walaupun terjadi sedikit kenaikan pada tahun 2010. Sedangkan untuk variabel ukuran pemprov, provinsi yang memiliki jumlah aset atau ukuran terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta dan provinsi yang memiliki jumlah aset terkecil adalah Provinsi Banten.

**Gambar 4.5 Rata-Rata DAU**



Sumber: Olah data penulis

#### 4.2. Uji Beda Rata-Rata

Selanjutnya dilakukan uji beda rata-rata menggunakan *independent t-test*. Dari nilai rata-rata skor kinerja, dilakukan pengujian beda rata-rata untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua kelompok sampel penelitian untuk setiap variabel independen dan variabel kontrol. Pengujian ini dilakukan untuk memberikan gambaran awal dari arah hipotesis yang akan diuji lebih lanjut dengan uji hipotesis.

Dalam melakukan uji beda rata-rata ini pembagian pemprov menggunakan data median masing-masing variabel. Pemprov akan dibagi menjadi dua kelompok dengan jumlah yang sama yaitu kelompok pemprov dengan rata-rata

rendah (di bawah nilai median) dan rata-rata tinggi (di atas nilai median). Hasil uji beda rata-rata disajikan pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Hasil Uji Beda Rata-Rata**

Variabel Dependen	Beda Rata-Rata		Sig. T-Test
	Rendah	Tinggi	
<b>AKTIF</b>	2.4805750	2.2757770	0.054***
<b>EFEKTIF</b>	2.3753152	2.3788729	0.974
<b>SEHAT</b>	2.2536727	2.4978516	0.021**
<b>RUMAH</b>	2.3902531	2.3641772	0.808
<b>DAU</b>	2.4288790	2.3263731	0.340
<b>TA</b>	2.2191753	2.5455013	0.002*

\*Signifikan pada  $\alpha = 1\%$

\*\*Signifikan pada  $\alpha = 5\%$

\*\*\*Signifikan pada  $\alpha = 10\%$

Sumber: Olah data SPSS

Berdasarkan Tabel 4.2, terdapat tiga variabel yang menunjukkan perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel. Untuk variabel rasio aktivitas terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan pada tingkat kepercayaan 90%. Dari data tersebut terlihat bahwa nilai rata-rata rasio aktivitas untuk kelompok dengan sampel tinggi lebih kecil dibandingkan dengan kelompok sampel rendah. Hal ini mengindikasikan rasio aktivitas memiliki hubungan negatif dengan skor kinerja. Untuk variabel kinerja kesehatan dan ukuran pemprov terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan pada tingkat kepercayaan 95% dan 99% antara kedua kelompok. Dari data tersebut terlihat nilai rata-rata kinerja kesehatan dan ukuran pemprov untuk kelompok sampel tinggi lebih besar dibandingkan kelompok sampel rendah. Hal ini mengindikasikan pemprov yang memiliki nilai rata-rata kinerja kesehatan dan ukuran pemprov memiliki hubungan positif dengan skor kinerja.

Sedangkan untuk variabel rasio efektivitas, kinerja perumahan dan tingkat ketergantungan tidak terdapat perbedaan antara dua kelompok sampel.

### 4.3. Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menandakan adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diketahui atau dilihat dari koefisien korelasi masing-masing variabel bebas. Jika koefisien korelasi masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0.8, maka terjadi multikolinearitas (Ajija *et al*, 2011).

**Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas**

	<b>AKTIF</b>	<b>EFEKTIF</b>	<b>SEHAT</b>	<b>RUMAH</b>	<b>DAU</b>	<b>TA</b>
<b>AKTIF</b>	1.000000					
<b>EFEKTIF</b>	-0.038428	1.000000				
<b>SEHAT</b>	0.009415	-0.009221	1.000000			
<b>RUMAH</b>	-0.156260	0.042608	-0.002987	1.000000		
<b>DAU</b>	-0.039947	0.087947	-0.558008	0.113426	1.000000	
<b>TA</b>	-0.135532	-0.006865	0.396655	-0.093008	-0.670065	1.000000

Sumber: Olah data Eviews

Dari Tabel 4.3 dapat kita lihat bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel yang lebih dari 0.8. Dengan demikian, tidak terdapat indikasi multikolinearitas dalam model penelitian ini. Hal ini juga didukung dengan nilai  $VIF < 5$  dan nilai  $Tolerance < 1$  (Tabel 4.4).

**Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas**

<b>Variabel</b>	<b><i>Tolerance</i></b>	<b>VIF</b>
<b>AKT</b>	0.950	1.053
<b>EFEK</b>	0.986	1.014
<b>SEHAT</b>	0.678	1.475
<b>RUMAH</b>	0.921	1.086
<b>RDAU</b>	0.606	1.650
<b>LNTA</b>	0.834	1.198

Sumber : Olah Data SPSS

#### 4.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan di mana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians yang sama (Ajija *et al*, 2011). Dilakukan uji *White Heteroscedasticity* dalam program Eviews untuk membuktikan dugaan pada uji heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan terhadap model dengan  $\alpha = 10\%$ . Bila  $P\text{-Value} < \alpha$ , maka terdapat indikasi gejala heteroskedastisitas. Pada model penelitian ini, dengan tingkat keyakinan 90% tidak ditemukan adanya gejala heteroskedastisitas karena  $P\text{-Value} = 0.4888 > \alpha$ . Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.890445	Prob. F(6,86)	0.5057
Obs*R-squared	5.439610	Prob. Chi-Square(6)	0.4888
Scaled explained SS	8.032402	Prob. Chi-Square(6)	0.2357

Sumber: Olah data Eviews

#### 4.4. Uji Hipotesis

**Tabel 4.6 Hasil Regresi**

Variable	Hipotesis	Koefisien	t-Statistik	Prob.
C		-1.935913	-1.016331	0.3123
AKTIF	(+)	-0.006369	-1.610020	0.1111
EFEKTIF	(+)	-0.000659	-0.190002	0.8498
SEHAT	(+)	0.010580	1.969907	0.0521**
RUMAH	(+)	0.003411	0.674293	0.5019
DAU	(+)	0.004216	1.230821	0.2217
TA	(+)	0.124816	2.101312	0.0385*
<i>Adjusted R-squared</i>		0.097042		
<b>F-statistic</b>		2.647898		
<b>Prob(F-statistic)</b>		0.020965		

\*Signifikan pada  $\alpha = 5\%$

\*\*Signifikan pada  $\alpha = 10\%$

Sumber: Olah data Eviews

Tabel 4.6 merupakan hasil pengujian model penelitian menggunakan program aplikasi Eviews 6. Dari tabel tersebut dapat dilihat nilai koefisien, nilai t-statistik dan probabilitas untuk setiap variabel independen. Terdapat juga nilai koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*), F-statistik dan probabilitasnya untuk melihat model secara keseluruhan.

#### 4.4.1. Uji Signifikansi Serentak (*F-test*)

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dengan membandingkan nilai *Prob (F-statistik)* dengan nilai  $\alpha$ . Jika nilai *Prob (F-statistik)*  $< \alpha$ , maka variabel independen berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen. Dalam tabel 4.6, *Prob (F-statistik)* menunjukkan nilai 0.020965 yang berarti lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari rasio aktivitas, rasio efektivitas, kesehatan, perumahan, tingkat ketergantungan daerah dan ukuran pemprov secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemprov.

#### 4.4.2. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Koefisien determinasi menunjukkan kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel dependen atau dengan kata lain seberapa besar proporsi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* dalam tabel 4.6 sebesar 9.7%. Hal ini berarti bahwa variasi skor kinerja pemprov dapat dijelaskan oleh rasio aktivitas, rasio efektivitas, kinerja kesehatan, kinerja perumahan, tingkat ketergantungan daerah dan ukuran pemprov sebesar 9.7%. Dengan demikian, 90.3% sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

#### 4.4.3. Uji Signifikansi Parsial (*t-Test*)

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah secara individual variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas dari t-statistik dalam Tabel 4.6. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai  $\alpha$ , maka variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen.

## 1. Rasio Aktivitas

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai probabilitas untuk variabel rasio aktivitas adalah 0.8498 yang lebih besar dari nilai  $\alpha$ . Hal ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja pemprov. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan bahwa rasio belanja pembangunan terhadap APBD memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja pemerintah provinsi ditolak.

Belanja daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja pembangunan yang digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan suatu provinsi, salah satu contoh adalah infrastruktur yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur ini tidak langsung dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat yang diterima baru akan dirasakan di periode yang beda pada saat belanja pembangunan dilakukan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purba (2006) yang menyatakan bahwa belanja yang dialokasikan untuk pembangunan daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 1976-2003 namun tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU No. 32/2004) Pasal 167 ayat 1 yang mensyaratkan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.

## 2. Rasio Efektivitas

Sama seperti variabel aktivitas, nilai probabilitas untuk variabel rasio efektivitas lebih besar dari nilai  $\alpha$  yang berarti bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja pemprov. Dengan demikian, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa rasio efektivitas memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja pemerintah provinsi ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Cahya (2010) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas berpengaruh signifikan dan memiliki korelasi yang kuat dan searah terhadap kinerja pemda.

Secara statistik deskriptif pemprov memiliki kemampuan yang baik dalam merealisasikan PAD. Namun pemprov kurang efektif dalam pengelolaan PAD yang ada. PAD seharusnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat namun pada kenyataannya tidak demikian. Sehingga tidak berpengaruh terhadap skor kinerja pemprov.

### 3. Kinerja Kesehatan

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai probabilitas untuk variabel kinerja kesehatan lebih kecil dari nilai  $\alpha = 10\%$  yang artinya bahwa kinerja kesehatan yang diukur melalui persentase pertolongan persalinan oleh bidan berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja pemprov pada tingkat keyakinan 90%. Nilai koefisien untuk variabel kinerja kesehatan menunjukkan tanda positif, yang artinya hubungan yang searah antara kesehatan (variabel independen) dengan skor kinerja pemprov (variabel dependen). Dengan demikian, hipotesis 3 yang menyatakan bahwa kinerja kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja pemerintah provinsi diterima. Semakin besar kinerja kesehatan akan menyebabkan semakin besar nilai skor kinerja pemprov.

### 4. Kinerja Perumahan

Berdasarkan Tabel 4.6 nilai probabilitas untuk variabel kinerja perumahan lebih besar dari nilai  $\alpha$  yang menunjukkan bahwa kinerja perumahan yang diukur melalui persentase rumah tangga pengguna air bersih tidak berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja pemprov. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 yang menyatakan bahwa kinerja perumahan memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja pemerintah provinsi ditolak.

Dalam IKK untuk urusan perumahan terdapat dua indikator yang diukur, yaitu rumah tangga pengguna air bersih dan rumah layak huni. Rumah tangga pengguna air bersih yang dipakai sebagai proksi dari kinerja perumahan dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap skor kinerja. Kemungkinan besar indikator rumah layak huni yang memiliki pengaruh terhadap skor kinerja.

### 5. Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat

Untuk variabel kontrol ini, penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap skor kinerja pemprov. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas untuk variabel ketergantungan pada pemerintah pusat yang lebih besar dari nilai  $\alpha = 10\%$ .

Semakin besar DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat akan menyebabkan pemprov tidak dapat mandiri. Kinerja pemprov untuk menggali potensi yang ada di daerah akan terhambat karena merasa terbantu dengan adanya DAU. Sehingga tidak berpengaruh terhadap skor kinerja pemprov. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Mustikarini (2012) yang mengungkapkan bahwa nilai DAU berpengaruh positif signifikan dengan skor kinerja pemda. Sama halnya dengan penelitian Sumarjo (2010) yang mengungkapkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemda kabupaten/kota di Indonesia.

#### **6. Ukuran Pemerintah Provinsi**

Untuk variabel kontrol yang kedua, penelitian ini menunjukkan hasil yang konsisten bahwa variabel ukuran pemprov berpengaruh positif terhadap skor kinerja pemprov. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas untuk variabel ukuran pemprov lebih kecil dari nilai  $\alpha = 5\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemprov yang diukur melalui total aset berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja pemprov pada tingkat keyakinan 95%. Nilai koefisien untuk variabel ukuran pemprov menunjukkan tanda positif yang berarti menunjukkan hubungan yang searah antara nilai total aset dengan skor kinerja pemprov.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mustikarini (2012) yang mengungkapkan bahwa nilai total aset berpengaruh positif signifikan dengan skor kinerja pemda. Semakin besar ukuran provinsi akan menyebabkan semakin besar nilai skor kinerja pemprov tersebut.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan berbagai pengujian dan analisis dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek keuangan yang terdiri dari:
  - a. Rasio aktivitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemprov.
  - b. Rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemprov.
2. Aspek non keuangan yang terdiri dari:
  - a. Kinerja kesehatan yang diwakili oleh persentase pertolongan persalinan oleh bidan berpengaruh positif terhadap skor kinerja pemprov. Semakin besar kinerja kesehatan akan menyebabkan semakin besar skor kinerja pemprov.
  - b. Kinerja perumahan yang diwakili oleh persentase rumah tangga pengguna air bersih tidak berpengaruh terhadap kinerja pemprov.
3. Variabel kontrol yang terdiri dari:
  - a. Tingkat ketergantungan yang diwakili oleh Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kinerja pemprov.
  - b. Ukuran pemprov yang diwakili oleh Total Aset (TA) berpengaruh positif terhadap skor kinerja pemprov. Pemprov yang memiliki ukuran lebih besar akan memiliki skor kinerja pemprov yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemprov yang memiliki ukuran kecil.

#### **5.2. Keterbatasan Penelitian**

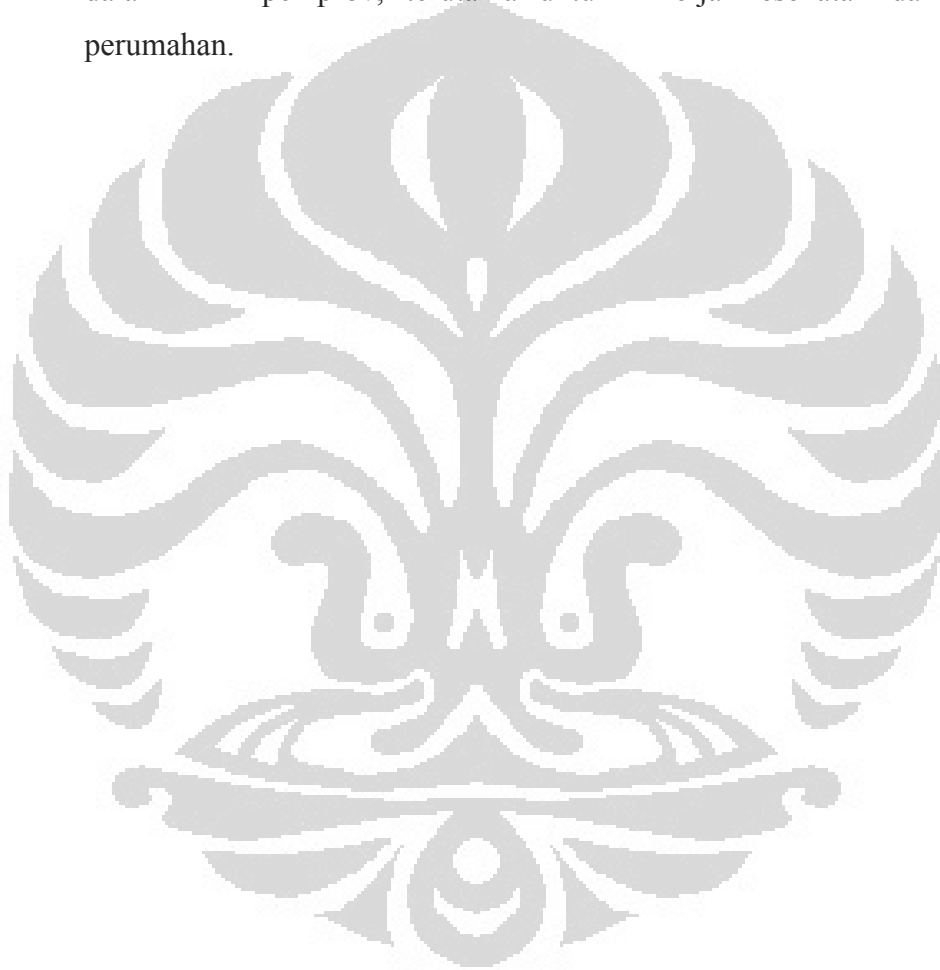
Terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan tersebut diantaranya:

1. Penelitian ini menggunakan metode *cross section* sehingga tidak dapat membandingkan kinerja pemprov dari tahun ke tahun.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya menjelaskan sebagian kecil dari variabel dependen.

### 5.3. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya diantaranya:

1. Penelitian selanjutnya dapat mengubah jenis data menjadi data panel untuk dapat membandingkan kinerja pemprov dari tahun ke tahun.
2. Memasukkan faktor-faktor lain yang belum diuji dalam penelitian ini seperti tingkat pertumbuhan, jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan jumlah pengangguran. Dapat juga memasukkan faktor-faktor lain yang ada dalam IKK pemprov, terutama untuk kinerja kesehatan dan kinerja perumahan.



## DAFTAR REFERENSI

- Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanti, M. R. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardhini. (2011). *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Asih, R. S. (2006). Tesis. *Kajian Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Penyediaan Air Bersih Secara Individual di Kawasan Kaplingan Kota Blora*.
- Azhar, M. K. (2008). Tesis. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*, 38.
- Bank Dunia. (2008). *Kajian Pengeluaran Publik Indonesia untuk Sektor Kesehatan 2008*. Rangkuman Eksekutif. Jakarta. Bank Dunia.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Cahya, A. M. (2010). *Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya*. Skripsi. Bandung: UNIKOM.
- Coll, Maria Teresa Balaguer., Prior, Diego., Ausina, Emili Tortosa. (2006). On the determinants of local government performance : A two-stage nonparametric approach. *European Economic Review (2007)*, 425-451.
- Dalimunthe, T. M. (2010). Skripsi. *Review Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008*.
- Detisa, D. (2010). Skripsi. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Khusus Pada Pemerintahan NAD*.
- Dhuanovawati, M. (2010). Skripsi. *Analisis Atas Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Untuk Tahun Anggaran 2008*.
- Febriana, A. (2010). Skripsi. *Analisis Tingkat Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2008*.
- Hakimudin, D. R. (2010). Skripsi. *Analisis Efisiensi Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2007*. Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

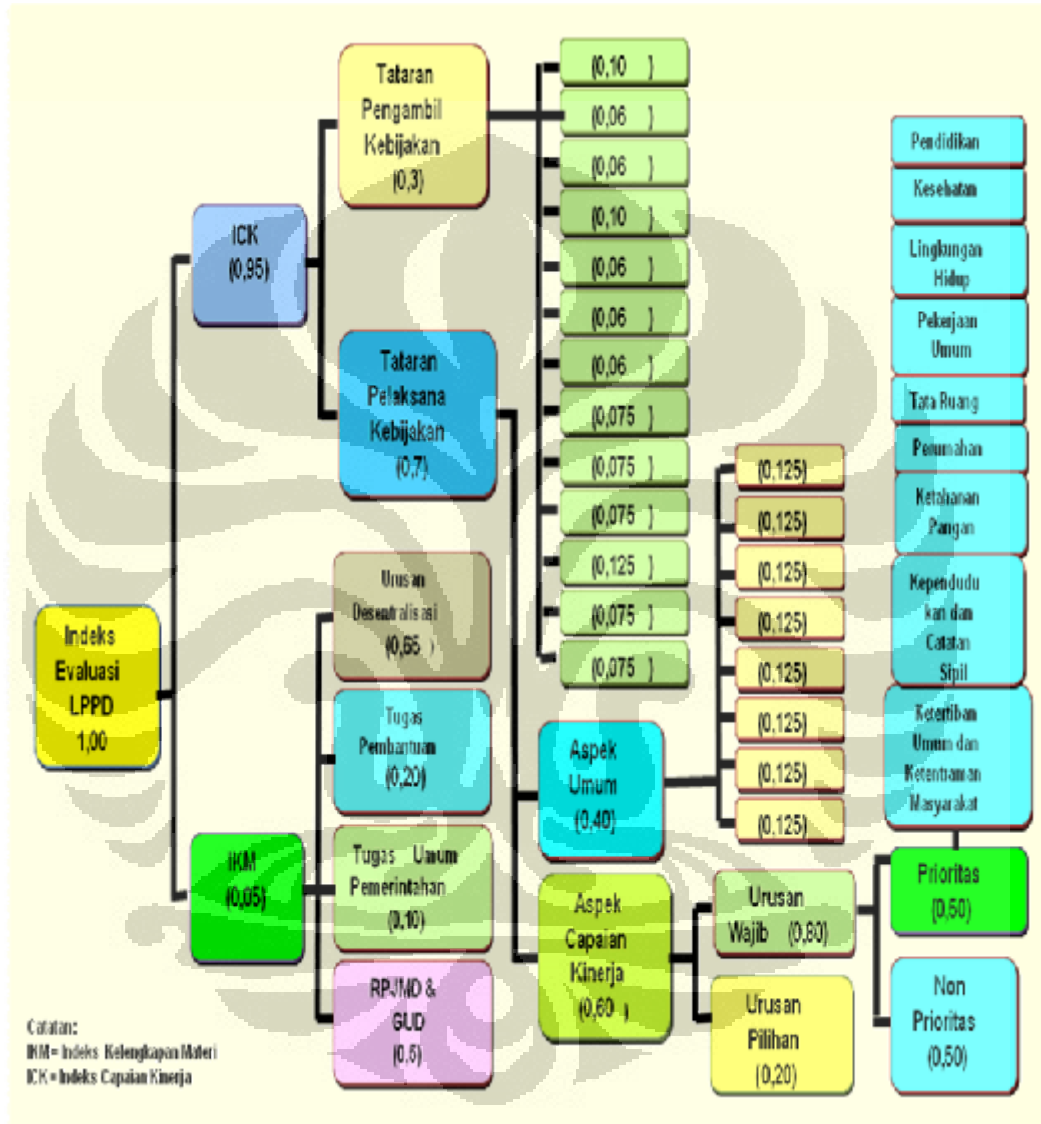
- \_\_\_\_\_. (2007). *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hamzah, A. (2008). *Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006)*.
- Heriansyah. (2005). *Analisis Rasio Keuangan Dalam Penilaian Kinerja APBD*.
- Janur, M. Y. (2009). Skripsi. *Analisis Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Sesudah Otonomi Daerah*.
- Keman, S. (2007). Kesehatan Lingkungan. *Enam Kebutuhan Fundamental Perumahan Sehat*. 3 (2). 183-194
- Kodoatie, Robert J., Basoeki. (2005). *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*. Yogyakarta. Andi.
- Krieger, J. And Higgins D.L. (2002). *Am J Public Health. Housing and Health: Time Again for Public Action*. 92 (5). 758-759.
- Lin, Ming-lan., Lee, Yuan-Duen., & Ho, Tsai-Neng. (2010). Applying Integrated DEA/AHP to Evaluate The Economic Performance of Local Government in China. *European Journal of Operational Research* 209 , 129-140
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*.
- Mustikarini, W. A. (2012). Skripsi. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, I. (2002). *Strategi Pengembangan Sektor Air Bersih di Jawa Timur*. Majalah. Malang. Universitas Widya Gama.
- Octaviani, S. D. (2009). Skripsi. *Analisis Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintah Kabupaten Langkat*.
- Ormond, D., & Loffler, E. (2002). *New Public Management: What to Take and What to Leave*. OECD.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- Purba, A. (2006). Tesis. *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Priyatno, D. (2011). *Buku Saku Analisis Statistik Data SPSS*. Yogyakarta: MediaKom.
- Puspita, R. (2010). Skripsi. *Pengaruh Kinerja, Ketergantungan, dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Pada Situs Pemda Tahun 2010*. Depok. Fakultas ekonomi Universitas Indonesia.
- Rustiono, D. (2008). Tesis. *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*.
- Sadjiarto, A. (2000). Jurnal Akuntansi & Keuangan. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan* , 139.
- Sasana, H. (2006). Dinamika Pembangunan. *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah* , 3 (2), 145-170.
- \_\_\_\_\_. (2009). Jurnal Ekonomi Pembangunan. *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah* , 10 (1), 103-124.

- Sedarmayanti. (2003). *Tata Kearsipan dengan Memanfaatkan Teknologi Modern*. Bandung. Mandar Maju.
- Silaen, F. E. (2006). Skripsi. *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tobasa*
- Sumarjo, Hendro. (2010). Skripsi. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Suranto, M.A. (2009). Skripsi. *Analisis Perubahan kemampuan Kinerja Keuangan Pemerintah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten Karanganyar*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Susilo, G. T. (2007). *Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Provinsi Jawa Tengah)*.
- Ulum, I. (2009). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Universitas Indonesia. (2008). *Pengantar Penulisan Ilmiah*.
- Vitawati, M. (2008). Skripsi. *Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah , 3*.
- Widodo. (2001). Skripsi. *Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Kabupaten Boyolali*. Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Bagan Bobot dan Komponen EKPPD Berdasarkan LPPD dan/atau Seplemen LPPD



Sumber : Sosialisasi Manual EKPPD Tahun Anggaran 2008

**Lampiran 2 Tabel Provinsi Tahun 2007-2010**

<b>No</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>IHPS</b>	<b>TAHUN</b>
1	Nangroe Aceh Darussalam	WDP	2007
2	Sumatera Barat	WDP	2007
3	Riau	WDP	2007
4	Kepulauan Riau	WDP	2007
5	Jambi	WDP	2007
6	Sumatera Selatan	WDP	2007
7	Bangka Belitung	WDP	2007
8	Bengkulu	WDP	2007
9	Lampung	WDP	2007
10	Jawa Barat	WDP	2007
11	Banten	WDP	2007
12	Jawa Tengah	WDP	2007
13	Daerah Istimewa Yogyakarta	WDP	2007
14	Bali	WDP	2007
15	Nusa Tenggara Timur	WDP	2007
16	Kalimantan Selatan	WDP	2007
17	Sulawesi Utara	WDP	2007
18	Sulawesi Tengah	WDP	2007
19	Sulawesi Barat	WDP	2007
20	Sulawesi Tenggara	WDP	2007
21	Papua	WDP	2007
22	Nangroe Aceh Darussalam	WDP	2008
23	Sumatera Utara	WDP	2008



No	PROVINSI	IHPS	TAHUN
24	Sumatera Barat	WDP	2008
25	Riau	WDP	2008
26	Kepulauan Riau	WDP	2008
27	Jambi	WDP	2008
28	Sumatera Selatan	WDP	2008
29	Bangka Belitung	WDP	2008
30	Bengkulu	WDP	2008
31	DKI Jakarta	WDP	2008
32	Jawa Barat	WDP	2008
33	Banten	WDP	2008
34	Jawa Tengah	WDP	2008
35	Daerah Istimewa Yogyakarta	WDP	2008
36	Jawa Timur	WDP	2008
37	Nusa Tenggara Barat	WDP	2008
38	Nusa Tenggara Timur	WDP	2008
39	Kalimantan Tengah	WDP	2008
40	Kalimantan Selatan	WDP	2008
41	Sulawesi Utara	WDP	2008
42	Gorontalo	WDP	2008
43	Sulawesi Tengah	WDP	2008
44	Sulawesi Barat	WDP	2008
45	Papua	WDP	2008
46	Nangroe Aceh Darussalam	WDP	2009
47	Sumatera Utara	WDP	2009
48	Riau	WDP	2009

No	PROVINSI	IHPS	TAHUN
49	Kepulauan Riau	WDP	2009
50	Jambi	WDP	2009
51	Sumatera Selatan	WDP	2009
52	Bangka Belitung	WDP	2009
53	Bengkulu	WDP	2009
54	Lampung	WDP	2009
55	DKI Jakarta	WDP	2009
56	Jawa Barat	WDP	2009
57	Banten	WDP	2009
58	Jawa Tengah	WDP	2009
59	Daerah Istimewa Yogyakarta	WDP	2009
60	Jawa Timur	WDP	2009
61	Bali	WDP	2009
62	Nusa Tenggara Barat	WDP	2009
63	Nusa Tenggara Timur	WDP	2009
64	Kalimantan Barat	WDP	2009
65	Kalimantan Selatan	WDP	2009
66	Sulawesi Utara	WTP	2009
67	Sulawesi Selatan	WDP	2009
68	Sulawesi Barat	WDP	2009
69	Sumatera Utara	WDP	2010
70	Sumatera Barat	WDP	2010
71	Riau	WTP	2010
72	Kepulauan Riau	WTP	2010
73	Jambi	WDP	2010

No	PROVINSI	IHPS	TAHUN
74	Sumatera Selatan	WDP	2010
75	Bangka Belitung	WDP	2010
76	Lampung	WDP	2010
77	DKI Jakarta	WDP	2010
78	Jawa Barat	WDP	2010
79	Banten	WDP	2010
80	Jawa Tengah	WDP	2010
81	Daerah Istimewa Yogyakarta	WTP	2010
82	Jawa Timur	WTP	2010
83	Bali	WDP	2010
84	Nusa Tenggara Timur	WDP	2010
85	Kalimantan Barat	WDP	2010
86	Kalimantan Selatan	WDP	2010
87	Kalimantan Timur	WDP	2010
88	Gorontalo	WDP	2010
89	Sulawesi Utara	WTP	2010
90	Sulawesi Tengah	WDP	2010
91	Sulawesi Barat	WDP	2010
92	Sulawesi Selatan	WDP	2010
93	Sulawesi Tenggara	WDP	2010